

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KURIKULUM

A. Basis Filosofis Madrasah sebagai Pendidikan Umum Dengan Kekhasan Agama Islam

Setiap tingkah laku kependidikan adalah tingkah laku yang bertujuan, dan bahwa setiap tujuan bersumber dari pilihan, dan bahwa setiap pilihan adalah alternatif yang berdasarkan pandangan falsafiah, pandangan falsafah pendidikan, dan bahwa pendidikan tidak dapat berkembang dan bermakna tanpa dasar falsafiah sebagai salah satu dasar yang mutlak. Madrasah sebagai Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam tentu memiliki basis filosofis yang jelas dan kokoh, sebagai landasan berpijak bagi pengelola dan/atau pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan madrasah selaras dengan kekhasannya.

Di dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. adalah bukan perintah tentang shalat, puasa dan lainnya, tetapi perintah iqra' (membaca, merenungkan, menelaah, meneliti atau mengkaji) atau perintah untuk mencerdaskan kehidupan manusia yang merupakan inti dari aktivitas pendidikan. Terhadap ayat-ayat yang pertama turun tersebut, Zia (2006) berkomentar, bahwa "Islam clearly prizes knowledge and learning and there is

no place in Islam for an illiterate society”¹. Perintah membaca/merenung/meneliti sebagai simbol dari urgensi ilmu pengetahuan harus diintegrasikan dengan wawasan ketuhanan (iqra’ bismi rabbik alladzi khalaq).

M. Amir Ali memberikan pengertian integrasi keilmuan: “Integration of sciences means the recognition that all true knowledge is from Allah and all sciences should be treated with equal respect whether it is scientific or revealed.”²

Kata kunci konsep integrasi keilmuan berangkat dari premis bahwa semua pengetahuan yang benar berasal dari Allah (all true knowledge is from Allah). Dalam pengertian yang lain, M. Amir Ali juga menggunakan istilah all correct theories are from Allah and false theories are from men themselves or inspired by Satan.³ Dengan pengertian yang hampir sama Usman Hassan menggunakan istilah "knowledge is the light that comes from Allah".⁴

Konsep integrasi keilmuan juga berangkat dari doktrin keesaan Allah (tawhîd), sebagaimana dikemukakan oleh Seyyed Hossein Nasr, the arts and sciences in Islam are based on the idea of unity, which is the heart of the

¹ Rukhsana Zia, (Ed), *Globalization, Modernization, And Education in Muslim Countries* (New York: Nova Science Publishers, Inc., 2006), 32.

² M. Amir Ali, *Removing the Dichotomy of Sciences: A Necessity for the Growth of Muslims*. Future Islam: A Journal of Future Ideology that Shapes Today the World Tomorrow. http://www.futureislam.com/20050301/insight/amir_ali/removing_dichotomy_of_sciences.asp, 2004.

³ Ibid.

⁴ Usman Hassan, *The Concept of Ilm and Knowledge in Islam* (New Delhi : The Association of Muslim Scientists and Engineers, 2003), 3.

Muslim revelation.⁵ Doktrin keesaan Tuhan, atau iman dalam pandangan Isma'il Razi al Faruqi, bukanlah semata-mata suatu kategori etika. Ia adalah suatu kategori kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan, dengan kebenaran proposisi-proposisinya.⁶ Dan karena sifat dari kandungan proposisinya sama dengan sifat dari prinsip pertama logika dan pengetahuan, metafisika, etika, dan estetika, maka dengan sendirinya dalam diri subjek ia bertindak sebagai cahaya yang menyinari segala sesuatu.

Al-Faruqi selanjutnya mengatakan:

As principle of knowledge, al tawhîd is the recognition that Allah, al haqq (the Truth) is, and that He is One. This implies that all contention, all doubt, is referable to Him; that no claim is beyond testing, beyond decisive judgment. Al tawhîd is the recognition that the truth is indeed knowable, that man is capable of reaching it. Skepticism which denies the truth is the opposite of al tawhîd. It arises out of a failure of nerve to push the inquiry into truth to its end; the premature giving up of the possibility of knowing the truth.⁷

Bagi al-Faruqi, mengakui Ketuhanan Tuhan dan keesaan berarti mengakui kebenaran dan kesatupaduan. Pandangan al-Faruqi ini memperkuat asumsi bahwa sumber kebenaran yang satu berarti tidak mungkin terjadi adanya dua atau lebih sumber kebenaran. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa integrasi keilmuan memiliki kesesuaian dengan prinsip *al tawhîd*. Mengatakan bahwa kebenaran itu satu, karenanya tidak hanya sama dengan menegaskan bahwa Tuhan itu satu, melainkan juga sama dengan

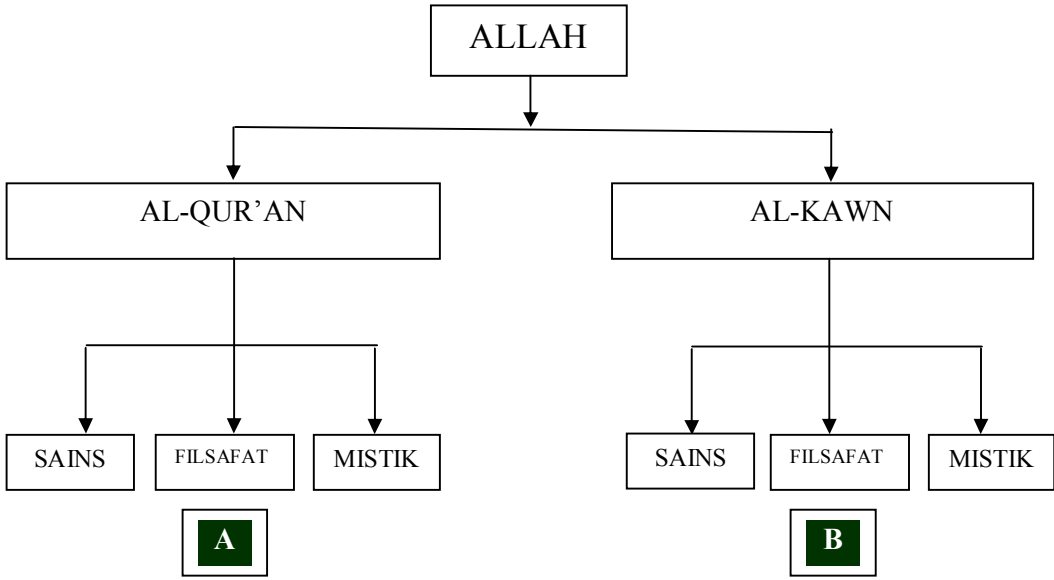
⁵ Seyyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam* (New York : New American Library, 1970), 21-22.

⁶ Isma'il Razi al-Faruqi, *Al-Tauhid: Its Implications for Thought and Life*, (Virginia-USA: The International Institute of Thought, 1992), 42.

⁷ Ibid.

menegaskan bahwa tidak ada Tuhan lain kecuali Allah, yang merupakan gabungan dari penafian dan penegasan yang dinyatakan oleh *syahadah*.

Menurut Tafsir⁸ Allah menyediakan dua sumber belajar, yaitu al-Qur'an dan *al-kawn* (alam semesta). Keduanya merupakan tempat manusia menimba pengetahuan. Teori-teori yang diperoleh dari dua sumber tersebut tidak mungkin berlawanan, karena bersumber dari Allah, dan tidak ada perlawanan dalam pengetahuan Allah. Dari kegiatan iqra' yang dilakukan oleh ilmuwan terhadap dua sumber belajar itu akan terhimpunlah pengetahuan manusia ke dalam 3 jenis pengetahuan, sebagaimana tercantum pada gambar berikut:



Gambar 2.1

Jenis-Jenis Pengetahuan yang berasal dari 2 sumber (Al-Qur'an dan Al-Kawn)⁹

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa teori-teori pada A tidak akan berlawanan dengan teori-teori pada B. Itulah hakekat kesatuan pengetahuan dalam

⁸ Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 103.

⁹ Ibid., 112.

Islam. Masing-masing pengetahuan tersebut memiliki paradigma, objek, metode, dan kriteria, sebagaimana tercantum dalam table berikut:

Tabel 2.1
Pengetahuan Manusia¹⁰

Pengetahuan	Paradigma	Objek	Metode	Kriteria
Sain	Sain	Empirik	Sain	Rasional-Empirik
Filsafat	Rasional	Abstrak-Rasional	Rasional	Rasional
Mistik	Suprarasional	Abstrak-suprarasional	Latihan, Percaya	Yakin, kadang-kadang empirik

Menurut Tafsir¹¹, bahwa pengetahuan agama itu ada yang bertempat di sain (kealaman dan sosial), ada yang di filsafat, dan ada yang di mistik. Bahkan pengetahuan agama itu seringkali menempati lebih dari satu jenis pengetahuan tersebut di atas, begitu juga etika, bahasa dan seni.

Bertolak dari uraian tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa pengembangan kurikulum madrasah, sebagai pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam, seharusnya mengembangkan kerangka pengetahuan yang berpusat dan bersumber dari Allah, atau menggunakan paradigma integrasi/kesatuan pengetahuan dalam Islam, baik kurikulum pada tingkatan institusi, bidang studi, maupun operasionalnya di dalam kegiatan pembelajaran.

Paradigma integrasi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kehidupan manusia bersifat kompleks dan multi-dimensi dalam berbagai aspek dan

¹⁰ Ibid., 105.

¹¹ Ibid., 111.

levelnya. Beragam disiplin ilmu adalah upaya manusia untuk memahami kompleksitas dimensi-dimensi hidup manusia. Setiap disiplin ilmu mencoba menyelami dimensi tertentu dari hidup manusia. Paradigma integrasi dimaksudkan untuk merumuskan keterpaduan dan keterkaitan antar disiplin ilmu sebagai jembatan untuk memahami kompleksitas hidup manusia demi meningkatkan kualitas hidup, baik dalam aspek material, moral maupun spiritual. Ilmu fisika, matematika, biologi, kimia, sejarah, dan ilmu lainnya yang biasa disebut sebagai ilmu umum, demikian pula ilmu tauhid, fiqih, tafsir, dan ilmu lain yang selama ini disebut dengan ilmu agama, pada dasarnya merupakan berbagai disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami kompleksitas hidup manusia. Peningkatan iman dan taqwa pada diri seseorang bukan hanya dengan menguasai ilmu tauhid, fiqih dan seterusnya, tetapi juga dapat tumbuh melalui studi sejarah, fisika, biologi, kimia, ilmu-ilmu sosial, dan lain-lain sebagaimana hal itu bisa dilihat dari pola penuturan Al-Qur'an.

Sebagai implikasinya, pengembangan kurikulum madrasah selalu *concern* terhadap kesatuan iman – ilmu – amal, sebagaimana firman Allah yang artinya: “Allah mengangkat derajat orang-orang yang ber-IMAN di antara kamu dan orang-orang yang diberi ILMU PENGETAHUAN. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu AMAL-kan” (Q.S. Al-Mujadalah: 11).

B. Hakekat dan Fungsi Kurikulum Pendidikan Islam

1. Pengertian Kurikulum

Definisi kurikulum dipengaruhi oleh filosofi atau aliran filsafat pendidikan tertentu. Dalam filsafat pendidikan terdapat berbagai aliran yang dapat dipetakan ke dalam dua kelompok, yaitu: *tradisional* dan *kontemporer*. Termasuk dalam kelompok tradisional adalah: *Perennialism* dan *Essentialism*, Sedangkan yang termasuk dalam kelompok kontemporer adalah: *Progressivism*, *Reconstructionism* dan *Existentialism*.¹²

Pengaruh pandangan filosofi terhadap pengertian kurikulum ditandai oleh pengertian kurikulum yang dinyatakan sebagai "*subject matter*", "*content*" atau bahkan "*transfer of culture*". Kelompok ahli yang menganut aliran perennialism menyatakan bahwa kurikulum merupakan "*transfer of culture*"¹³. Filsafat ini memang memiliki tujuan yang sama dengan *essentialism* dalam hal intelektualitas. Seperti dikemukakan oleh Tanner dan Tanner¹⁴, kedua pandangan filosofi itu berpendapat bahwa adalah tugas kurikulum untuk mengembangkan intelektualitas.

Dalam istilah yang digunakan Tanner dan Tanner¹⁵ *perennialism* mengembangkan kurikulum yang merupakan proses bagi *cultivation of the rational powers: academic excellence*, sedangkan *essentialism* memandang kurikulum sebagai rencana untuk mengembangkan *academic excellence dan cultivation of intellect*. Perbedaan antara keduanya adalah menurut pandangan *perennialism* "the cultivation of the intellectual virtues is accomplish only

¹²Arthur K Ellis, Cogan, J. John, Howey, Kenneth R. *Introduction To The Foundations of Education* (New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1986), 115.

¹³Daniel Tanner, dan Laurel Tanner, *Curriculum Development: Theory into Practice* (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1980), 104.

¹⁴Ibid., 104-113.

¹⁵Ibid., 104.

through permanent studies that constitute our intellectual inheritance". *Permanent studies* adalah konten kurikulum yang berdasarkan tradisi Barat terdiri atas Great Books, reading, rhetoric, and logic, mathematics. Sedangkan bagi *essentialism* beranggapan bahwa kurikulum haruslah mengembangkan "modern needs through the fundamental academic disciplines of English, mathematics, science, history, and modern languages"¹⁶.

Banyak kecaman terhadap pengertian kurikulum yang dikembangkan dari kedua aliran tersebut, walaupun dalam kenyataannya masih banyak orang dan pengambil kebijakan yang menganut pandangan ini. Kurikulum di Indonesia juga masih didominasi oleh pandangan ini. Konten atau isi kurikulum dalam pandangan kedua aliran tersebut adalah materi yang dikembangkan dari disiplin ilmu; tujuan adalah penguasaan konsep, teori, atau hal yang terkait dengan disiplin ilmu.

Di sisi lain, terdapat kelompok aliran progresif, yang lebih memandang kurikulum - bukan hanya untuk meneruskan tradisi intelektualitas masa lalu - tetapi juga untuk memenuhi tuntutan perubahan masa sekarang dan masa depan, Termasuk kelompok aliran progresif adalah aliran romantis *naturalisme*, *eksistensialisme*, *eksperimentalisme*, dan *rekonstruksionisme*.

Menurut aliran *rekonstruksionisme*, kurikulum tidak hanya berfungsi untuk melestarikan budaya atau apa yang ada pada saat sekarang tetapi juga berfungsi untuk membentuk masa depan atau *shaping the future*, sebagaimana dikemukakan oleh McNeil (1985):

¹⁶ Ibid., 109.

Social reconstructionists are opposed to the notion that the curriculum should help students adjust or fit the existing society. Instead, they conceive of curriculum as a vehicle for fostering critical discontent and for equipping learners with the skills needed for conceiving new goals and affecting social change.¹⁷

Pandangan *rekonstruksionisme* tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa kurikulum hanya memikirkan kerusakan atau persoalan sosial yang ada dan meninggalkan sama sekali apa yang sudah dihasilkan di masa lalu, dan diawatirkan kontinuitas kehidupan dan perkembangan masyarakat akan terganggu.

Pandangan rekonstruksi sosial di atas menyebabkan kurikulum haruslah didefinisikan kembali sehingga ia tidak *mediocre* karena hanya menfokuskan diri pada *transfer* kejayaan masa lalu, pengembangan intelektualitas, atau pun menyiapkan peserta didik untuk kehidupan masa kini. Padahal masa kini adalah kelanjutan dari masa lalu dan masa kini akan terus berubah dan sukar diprediksi. Kemajuan teknologi telah memberikan *velocity* (kecepatan) perubahan pada berbagai aspek kehidupan pada tingkat yang tak pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Pendidikan harus aktif membentuk dan mengembangkan potensi peserta didik untuk suatu kehidupan yang akan dimasukinya dan dibentuknya. Peserta didik akan menjadi anggota masyarakat yang secara individu maupun kelompok tidak hanya dibentuk oleh masyarakat (dalam posisi menerima = pasif), tetapi harus mampu memberi dan mengembangkan masyarakat ke arah yang diinginkan (posisi aktif). Artinya,

¹⁷John McNeil, *Curriculum, A Comprehensive Introduction* (Boston: Little, Brown and Company, 1985), 19.

kurikulum merupakan rancangan dan kegiatan pendidikan yang secara maksimal mengembangkan potensi kemanusiaan yang ada pada diri seseorang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat untuk kehidupan dirinya, masyarakat, dan bangsanya di masa mendatang.

2. Kurikulum Pendidikan Islam

Untuk memahami pengertian kurikulum pendidikan Islam dapat ditempuh dengan cara mendefinisikan pendidikan Islam itu sendiri. Banyak definisi tentang pendidikan Islam, tetapi pada intinya ada dua¹⁸, yaitu: *pertama*, pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang sengaja diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan *niat* untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya di Indonesia, pendidikan Islam ini setidaknya-tidaknya dapat dikelompokkan ke dalam lima jenis, yaitu:

- a. Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah, yang menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebut sebagai pendidikan keagamaan (Islam) formal seperti Pondok Pesantren/ Madrasah Diniyah ('Ulya, Wusta, 'Ulya, dan Ma'had 'Ali);
- b. Madrasah dan pendidikan lanjutannya seperti IAIN/STAIN atau Universitas Islam Negeri yang bernaung di bawah Departemen Agama;
- c. Pendidikan usia dini/TK, Sekolah/Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh dan/atau berada di bawah naungan yayasan dan organisasi Islam;

¹⁸Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam dari Paradigma Pengembangan Hingga Manajemen Kelembagaan, Kurikulum dan Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 16-17.

- d. Pelajaran agama Islam di sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah, dan/atau sebagai program studi; dan
- e. Pendidikan Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah, dan/atau di forum-forum kajian keislaman, majelis ta'lim, dan institusi-institusi lainnya yang sekarang sedang digalakkan oleh masyarakat, atau pendidikan (Islam) melalui jalur pendidikan non formal, dan informal.

Kedua, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam.¹⁹ Dalam pengertian yang kedua ini, pendidikan Islam bisa mencakup: (1) pendidik/guru/dosen, orang tua, kepala madrasah/sekolah atau pimpinan Perguruan Tinggi dan/atau tenaga kependidikan lainnya yang melakukan dan mengembangkan aktivitas kependidikannya disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam; dan/atau (2) komponen-komponen pendidikan lainnya, seperti kurikulum (yang mencakup tujuan, isi, strategi/metode, dan evaluasi), lingkungan/konteks, manajemen, dan lain-lain yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam, atau yang berciri khas Islam.

Dari kedua pengertian pendidikan Islam tersebut, maka pengertian *pertama* lebih menekankan pada aspek kelembagaan dan program pendidikan Islam, dan yang *kedua* lebih menekankan pada aspek *spirit* Islam yang melekat pada setiap aktivitas pendidikan. Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam, dengan demikian, adalah kurikulum yang berlaku dan dikembangkan pada lima lembaga (institusi) pendidikan Islam tersebut di atas,

¹⁹ Ibid.

dan/atau kurikulum pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam²⁰.

Dalam dunia pendidikan (termasuk pendidikan Islam) biasanya ada tim penyusun kurikulum yang menghasilkan seperangkat program atau aktivitas yang dirancang dalam kurikulum, dan ada pelaksana atau pengembang kurikulum yaitu guru. Apa yang diprogramkan dalam kurikulum ada kemungkinan tidak semuanya terakomodasi dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, kemudian dikenal adanya kurikulum yang dirancang atau yang diistilahkan *official curriculum/planned curriculum*, dan kurikulum yang terealisasi yang diistilahkan dengan *actual curriculum/received curriculum*²¹.

Bagaimana dengan kurikulum yang ada di Madrasah? Idealnya, apa yang terdapat dalam kurikulum yang dirancang sama atau tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang terealisasi. Hal itu sangat dimungkinkan karena guru sebagai pengembang dan pelaksana kurikulum terlibat juga dalam penyusunan kurikulum.

3. Fungsi Kurikulum Pendidikan Islam

a. Bagi sekolah/Madrasah yang bersangkutan:

- 1) alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, atau dalam istilah KBK disebut standar kompetensi lulusan.
- 2) pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah

²⁰ Ibid.

²¹ A.Vic. Kelly, *The Curriculum: Theory and Practice (6th Edition)* (New Delhi: Sage Publication Ltd., 2009), 11.

- b. Bagi sekolah/Madrasah di atasnya:
 - 1) melakukan penyesuaian
 - 2) menghindari keterulangan sehingga boros waktu
 - 3) menjaga kesinambungan
- c. Bagi masyarakat:
 - 1) Masyarakat sebagai pengguna lulusan (*users*), sehingga sekolah/Madrasah harus mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat
 - 2) Adanya kerjasama yang harmonis dalam hal pembenahan dan pengembangan kurikulum²²

4. Posisi Kurikulum Dalam Pendidikan

Kurikulum memiliki posisi sentral dalam setiap upaya pendidikan²³. Posisi sentral ini menunjukkan bahwa di setiap unit pendidikan kegiatan kependidikan yang utama adalah proses interaksi akademik antara peserta didik, pendidik, sumber dan lingkungan, dan menunjukkan pula bahwa setiap interaksi akademik adalah jiwa dari pendidikan. Dapat dikatakan bahwa kegiatan pendidikan atau pembelajaran pun tidak dapat dilakukan tanpa interaksi dan kurikulum adalah desain dari interaksi tersebut.

Dalam posisi tersebut, maka kurikulum merupakan bentuk akuntabilitas lembaga pendidikan terhadap masyarakat. Setiap lembaga pendidikan, apakah lembaga pendidikan yang terbuka untuk setiap orang

²²Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. IV, 2010), 11-12.

²³ M.F. Klein , *Curriculum Reform in the Elementary School: Creating Your Own Agenda* (New York and London: Teachers College, Columbia University, 1989), 15.

ataupun lembaga pendidikan khusus seharusnya dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya terhadap masyarakat, atau dapat memberikan *academic accountability* dan *legal accountability* berupa kurikulum. Oleh karena itu jika ada yang ingin mengkaji dan mengetahui suatu kegiatan akademik apa dan apa yang ingin dihasilkan oleh suatu lembaga pendidikan, maka ia harus melihat dan mengkaji kurikulum. Jika seseorang ingin mengetahui apakah yang dihasilkan ataukah pengalaman belajar yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka ia harus mempelajari dan mengkaji kurikulum lembaga pendidikan tersebut.

Dalam pengertian *intrinsik* kependidikan maka kurikulum adalah jantung pendidikan. Artinya, semua gerak kehidupan kependidikan yang dilakukan sekolah/madrasah didasarkan pada apa yang direncanakan kurikulum. Kehidupan di sekolah/madrasah adalah kehidupan yang dirancang berdasarkan apa yang diinginkan kurikulum. Pengembangan potensi peserta didik menjadi kualitas yang diharapkan adalah didasarkan pada kurikulum. Proses belajar yang dialami peserta didik di kelas, di sekolah/madrasah, dan di luar sekolah/madrasah dikembangkan berdasarkan apa yang direncanakan kurikulum. Kegiatan evaluasi untuk menentukan apakah kualitas yang diharapkan sudah dimiliki oleh peserta didik dilakukan berdasarkan rencana yang tercantum dalam kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum adalah dasar dan sekaligus pengontrol terhadap aktivitas pendidikan. Tanpa kurikulum yang jelas apalagi jika tidak ada kurikulum sama sekali, maka kehidupan

pendidikan di suatu lembaga menjadi tanpa arah dan tidak efektif dalam mengembangkan potensi peserta didik menjadi kualitas pribadi yang optimal.

Untuk menegakkan akuntabilitasnya maka kurikulum tidak boleh hanya membatasi diri pada persoalan pendidikan dalam pandangan perenialisme atau esensialisme. Kedua pandangan ini hanya akan membatasi kurikulum dan pendidikan, dalam kepeduliaannya. Kurikulum dan pendidikan melepaskan diri dari berbagai masalah sosial yang muncul, hidup, dan berkembang di masyarakat. Kurikulum menyebabkan sekolah/madrasah menjadi lembaga menara gading yang tidak terjamah oleh keadaan masyarakat dan tidak berhubungan dengan masyarakat. Situasi seperti ini tidak dapat dipertahankan dan kurikulum seharusnya memperhatikan tuntutan masyarakat dan rencana bangsa untuk kehidupan masa mendatang. Problema masyarakat seharusnya dianggap sebagai tuntutan, menjadi kepeduliaan dan masalah kurikulum. Apakah kurikulum bersifat mengembangkan kualitas peserta didik yang diharapkan dapat memperbaiki masalah dan tantangan masyarakat, ataukah kurikulum merupakan upaya pendidikan membangun masyarakat baru yang diinginkan bangsa, menempatkan kurikulum pada posisi yang berbeda.

Bertolak dari uraian di atas, maka secara singkat posisi kurikulum dapat disimpulkan menjadi tiga:

1. Posisi pertama adalah kurikulum adalah *construct* yang dibangun untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan atau dikembangkan. Pengertian

kurikulum berdasarkan pandangan filosofis perenialisme dan esensialisme sangat mendukung posisi pertama kurikulum ini.

2. Posisi kedua, adalah kurikulum berposisi sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang berkenaan dengan pendidikan. Posisi ini dicerminkan oleh pengertian kurikulum yang didasarkan pada pandangan filosofi progresivisme.
3. Posisi ketiga adalah kurikulum untuk membangun kehidupan masa depan dimana kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan. Posisi ini dicerminkan oleh pengertian kurikulum yang didasarkan pada pandangan filosofi rekonstruksi sosial.

C. Mekanisme dan Proses Pengembangan Kurikulum

Konsep pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai berikut: *pertama*, perekeyasaan (*engineering*), yang meliputi empat tahap, yakni: (1) menentukan fondasi atau dasar-dasar yang diperlukan untuk mengembangkan kurikulum; (2) konstruksi, yaitu mengembangkan model kurikulum yang diharapkan berdasarkan fondasi tersebut; (3) implelementasi, yaitu pelaksanaan kurikulum; dan (4) evaluasi, yaitu menilai kurikulum secara komprehensif dan sistemik. *Kedua*, konstruksi (*construction*), yaitu proses pengembangan secara mikro, yang pada garis besarnya melalui proses 4 (empat) kegiatan,

yakni merancang tujuan, merumuskan materi, menetapkan metode, dan merancang evaluasi²⁴.

Adapun mekanisme pengembangan kurikulum melalui 7 (tujuh) tahap, yaitu:

1. **Tahap 1:** Studi kelayakan dan kebutuhan. Pada tahap ini pengembang kurikulum melakukan kegiatan analisis kebutuhan program dan merumuskan dasar-dasar pertimbangan bagi pengembangan kurikulum tersebut. Untuk itu si pengembang perlu melakukan studi dokumentasi dan/atau studi lapangan.
2. **Tahap 2:** Penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Konsep awal ini dirumuskan berdasarkan rumusan kemampuan, selanjutnya merumuskan tujuan, isi, strategi pembelajaran sesuai dengan pola kurikulum sistemik.
3. **Tahap 3:** Pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Penyusunan rencana ini mencakup penyusunan silabus, pengembangan bahan pelajaran dan sumber-sumber material lainnya.
4. **Tahap 4 :** Pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Pengujian kurikulum di lapangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keandalannya, kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilannya, hambatan dan masalah-masalah yang timbul dan faktor-faktor pendukung yang tersedia, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum.

²⁴ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007), 142-143.

5. **Tahap 5:** Pelaksanaan kurikulum. Pada tahap ini terdapat 2 (dua) kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu: (1) kegiatan *desiminasi*, yakni pelaksanaan kurikulum dalam lingkup sampel yang lebih luas; dan (2) pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh yang mencakup semua satuan pendidikan pada jenjang yang sama.
6. **Tahap 6:** Pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Selama pelaksanaan kurikulum perlu dilakukan penilaian dan pemantauan yang berkenaan dengan desain kurikulum dan hasil pelaksanaan kurikulum serta dampaknya.
7. **Tahap 7:** Pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Berdasarkan penilaian dan pemantauan kurikulum diperoleh data dan informasi yang akurat, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan pada kurikulum tersebut bila diperlukan, atau melakukan penyesuaian kurikulum dengan keadaan. Perbaikan bisa dilakukan terhadap beberapa aspek dalam kurikulum tersebut²⁵.

Menurut Kelly (2009) bahwa dalam pengembangan kurikulum setidaknya ada empat hal yang mesti diperhatikan, yaitu tujuan (*goals/objectives*), isi (*content/ subject matter*), metode/prosedur, dan evaluasi.²⁶ Tujuan pada prinsipnya berupa seperangkat kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Isi pada prinsipnya berupa pengalaman belajar atau materi ajar yang mesti dilakukan oleh peserta didik

²⁵ Ibid.

²⁶ Kelly, *The Curriculum*, 20.

untuk mencapai tujuan. Metode atau prosedur merupakan pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai tujuan secara efektif. Evaluasi terkait dengan instrumentasi untuk mengukur pencapaian tujuan.

Dalam sistem pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, tujuan itu dinyatakan dengan standar kompetensi lulusan (SKL) atau yang biasa dikenal dengan standar kompetensi (SK) saja. Standar kompetensi tersebut biasanya dijabarkan lagi menjadi beberapa kompetensi dasar. Persoalannya, dari mana rumusan standar kompetensi itu mesti diperoleh. Idealnya, standar kompetensi itu dirumuskan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan di masa yang akan datang, bukan pada saat kurikulum itu disusun. Sebab, bila didasarkan pada saat kurikulum disusun, nanti bisa jadi saat peserta didik lulus sudah tidak relevan lagi.

Untuk mencapai kompetensi yang telah dirumuskan diperlukan pengalaman belajar tertentu. Pengalaman belajar itu dapat dicapai melalui isi atau materi ajar, yang kemudian dapat dimunculkan melalui *content* mata pelajaran. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya bila dalam penyusunan atau pengembangan kurikulum dimulai dengan menetapkan mata pelajaran lebih dahulu, sebelum menentukan kompetensi yang mesti dicapai oleh peserta didik.

Pengorganisasian pengalaman belajar atau materi ajar yang kemudian muncul dalam mata pelajaran tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu kompetensi. Pada bagian ini termasuk di dalamnya pengelompokan materi

atau mata pelajaran, pembobotan sks mata pelajaran, distribusi atau sekuensi mata pelajaran dan sebagainya.

Unruh dan Unruh (1984) mengatakan bahwa proses pengembangan kurikulum merupakan:

a complex process of assessing needs, identifying desired learning outcomes, preparing for instruction to achieve the outcomes, and meeting the cultural, social, and personal needs that the curriculum is to serve.²⁷

Berbagai faktor seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu, teknologi berpengaruh dalam proses pengembangan kurikulum. Oleh karena itu Olivia (1997) selain mengakui bahwa pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang kompleks, lebih lanjut mengatakan:

Curriculum is a product of its time. . . curriculum responds to and is changed by social forced, philosophical positions, psychological principles, accumulating knowledge, and educational leadership at its moment in history.²⁸

Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan kurikulum fokus awal memberi petunjuk jelas apakah kurikulum yang dikembangkan tersebut kurikulum dalam pandangan tradisional, modern ataukah romantism.

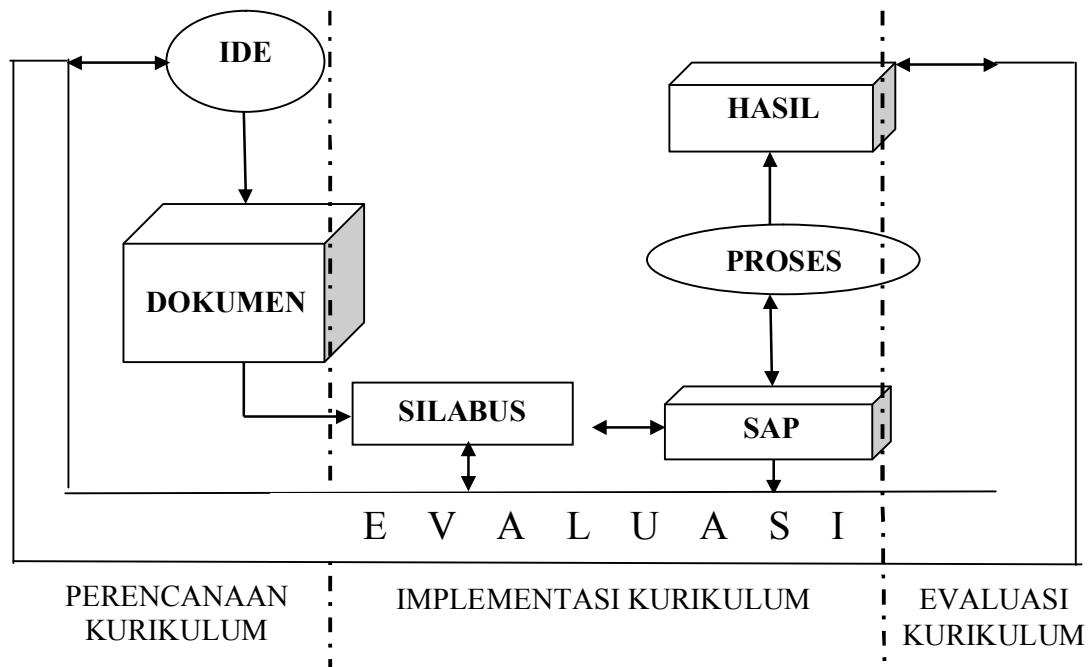
Model pengembangan kurikulum yang biasanya digunakan dalam banyak proses pengembangan kurikulum adalah model yang lebih banyak mengambil posisi pertama (*construct*), yakni kurikulum sebagai rencana dan

²⁷ G.G. Unruh, dan A. Unruh, *Curriculum Development: Problems, Processes, and Progress*. Berkeley (California: McCutchan Publishing Corporation, 1984), 97.

²⁸ P.F. Olivia, *Developing the Curriculum 4th edition* (New York: Longman, 1997), 39-41.

kegiatan. Ide yang dikembangkan pada langkah awal lebih banyak berfokus pada kualitas apa yang harus dimiliki dalam belajar suatu disiplin ilmu, teknologi, agama, seni, dan sebagainya. Pada fase pengembangan ide, permasalahan pendidikan hanya terbatas pada permasalahan transfer dan transmisi. Masalah yang muncul di masyarakat atau ide tentang masyarakat masa depan tidak menjadi kepedulian kurikulum. Kegiatan evaluasi diarahkan untuk menemukan kelemahan kurikulum yang ada, model yang tersedia dan dianggap sesuai untuk suatu kurikulum baru, dan diakhiri dengan melihat hasil kurikulum berdasarkan tujuan yang terbatas.

Keseluruhan proses pengembangan kurikulum dapat digambarkan sebagai berikut:²⁹



²⁹ S. Hamid Hasan, dalam Suparlan (2009), *Modul Kurikulum Dan Pengembangan Materi Pembelajaran*, (Jakarta: FKIP Universitas Tama Jagakarsa, 2009), 14.

Gambar 2.2 **Proses Pengembangan Kurikulum**

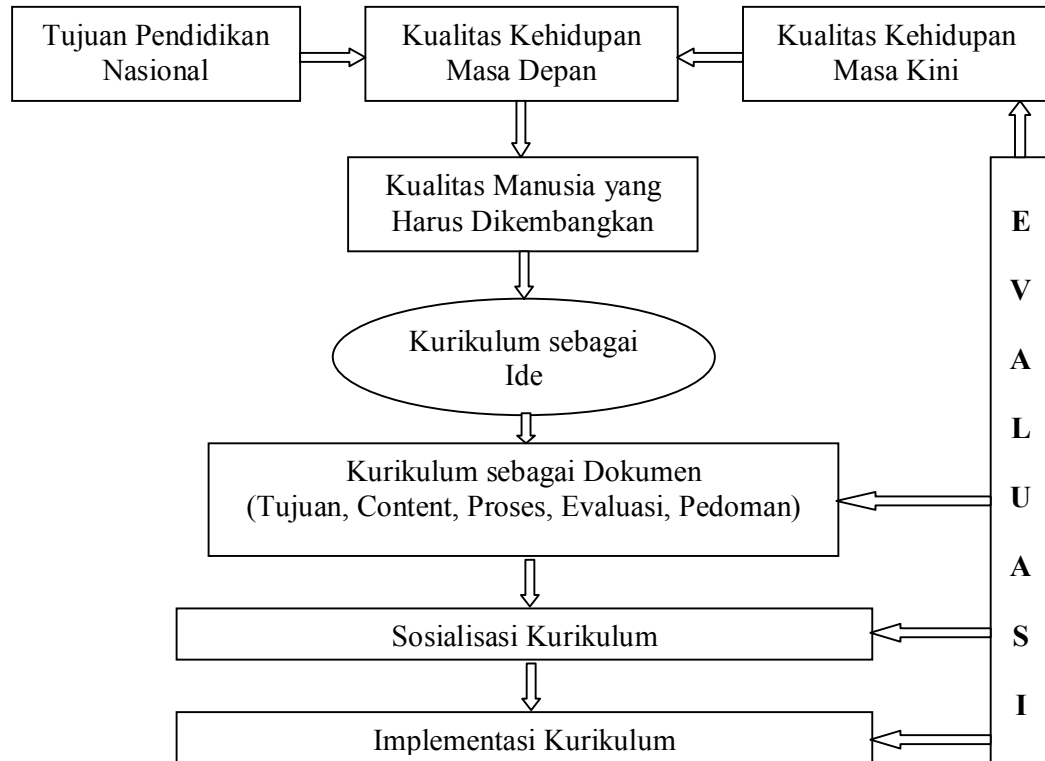
Dalam proses pengembangan tersebut unsur-unsur luar seperti kebudayaan di mana suatu lembaga pendidikan berada, tidak mendapat perhatian. Konsep diversifikasi kurikulum menempatkan konteks sosial-budaya seharusnya menjadi pertimbangan utama. Sayangnya, karena sifat ilmu yang universal menyebabkan konteks sosial-budaya tersebut terabaikan. Padahal seperti dikemukakan Longstreet dan Shane (1993) bahwa kebudayaan berfungsi dalam dua perspektif yaitu eksternal dan internal:

The environment of the curriculum is external insofar as the social order in general establishes the milieu within which the schools operate; it is internal insofar as each of us carries around in our mind's eye models of how the schools should function and what the curriculum should be. The external environment is full of disparate but overt conceptions about what the schools should be doing. The internal environment is a multiplicity of largely unconscious and often distorted views of our educational realities for, as individuals, we caught by our own cultural mindsets about what should be, rather than by a recognition of our swiftly changing, current realities.³⁰

Model berikut ini adalah model yang menempatkan kurikulum dalam posisi kedua dan ketiga. Dalam model ini maka proses pengembangan kurikulum dimulai dengan evaluasi terhadap masyarakat. Identifikasi masalah dalam masyarakat dan kualitas yang dimiliki suatu komunitas pada saat sekarang dijadikan dasar dalam perbandingan dengan kualitas yang diinginkan masyarakat sehingga menghasilkan kualitas manusia yang harus dikembangkan oleh kurikulum. Dalam model ini maka proses pengembangan kurikulum selalu dimulai dengan evaluasi terhadap masyarakat. Pencapaian

³⁰ W.S. Longstreet, dan G.Sh. Shane, *Curriculum for A New Millenium* (Boston: Allyn & Bacon, 1993), 87.

tujuan kurikulum pun diukur dengan keberhasilan lulusan di masyarakat, sebagaimana gambar berikut:³¹



Gambar 2.3
Pencapaian Tujuan Kurikulum

D. Pengembangan Kurikulum Madrasah Sebagai Pendidikan Umum Dengan Kekhasan Agama Islam

1. Pengembangan Kurikulum Madrasah dan Problematikanya

a. Karakteristik Madrasah Aliyah

Kurikulum Madrasah Aliyah memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri, sehingga dalam konteks kurikulum perlu menampakan

³¹Hasan, dalam Suparlan (2009), *Modul*, 16.

karakteristik tersebut. Oleh karena itu perumusan dan pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah menjadi suatu hal yang sangat penting. Di satu sisi kurikulum tersebut harus memiliki relevansi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan di sisi lain Madrasah Aliyah harus mencerminkan jati dirinya sebagai satuan pendidikan yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada beberapa aspek sebagai berikut:

1) Peserta didik (seperti apa inputnya)

Peserta didik Madrasah Aliyah dalam kedudukannya sebagai siswa, dipandang oleh sebagian besar ahli psikologi sebagai individu yang berada pada tahap tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan seseorang. Usia ini biasanya berkisar antara 13 tahun s.d 21 tahun. Masa ini sering disebut masa puber dan adolesen, artinya periode transisi dari masa kanak-kanak menuju ke masa orang dewasa. Masa ini ditandai dengan: (a) timbulnya *sturm und drang* dalam hidup kejiwaannya, (b) timbulnya pikiran yang realistis dan kritis, (c) timbulnya gejala sikap meragukan terhadap kebenaran agama, namun sikap demikian oleh banyak ahli dianggap sebagai mukadimah bagi timbulnya keimanan yang sebenarnya, (d) timbulnya konflik batin dalam menghadapi realitas kehidupan. Konflik ini disebabkan oleh perkembangan pikiran sendiri, oleh karena frustrasi,

karena etik kesusilaan, (e) merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa³².

Secara umum meraka (siswa Madrasah Aliyah) dikategorikan masa remaja, dimana pada masa ini terjadi perubahan-perubahan yang bersifat universal, seperti: meningginya emosi, yang intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis, perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk dimainkan, menimbulkan masalah baru, berubahnya minat dan pola perilaku dan nilai-nilai, sebagian besar remaja bersikap mendua (ambivalen) terhadap setiap perubahan³³.

Dari tanda-tanda masa remaja di atas, pada akhirnya akan berdampak sekaligus mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan: (a) Aspek kecerdasan (kognitif), yaitu berkaitan dengan kemampuan berfikir, mengingat sampai mampu memecahkan masalah. Kemampuan kognitif termasuk pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. (b) Aspek perasaan (afektif) yaitu kemampuan yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai dan sikap hati yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Adapun ruang lingkup aspek ini meliputi pengenalan/penerimaan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian dan pengamalan). (c) Aspek keterampilan (psikomotor), yaitu berkaitan

³² Muzayyin Arifin, *Filsafat pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 215.

³³ Departemen Agama, *Desain Pengembangan Madrasah* (Jakarta : Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Depag, 2004), 5.

dengan ketrampilan motorik berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi antara syaraf dan otak. Kemampuan ini termasuk meniru, memanipulasi, akurasi gerak, artikulasi dan naturalisasi atau otonomisasi.³⁴

2) Aspek tujuan

Mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlakul karīmah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *baṣṭatan fī al-'ilm wa al-jism* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Dalam mencapai arah dan tujuan itu, bentuk kurikulum yang diberikan adalah kurikulum pendidikan Islam secara komprehensif dan modern yang selalu sensitif dan tanggap terhadap perkembangan zaman. Spesifikasi dan ciri khasnya adalah penguasaan al-Qur'an secara mendalam, terampil berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa antar bangsa yang dominan, berpendekatan ilmu pengetahuan, berketerampilan teknologi dan fisik, berjiwa mandiri, penuh perhatian terhadap aspek dinamika kelompok dan bangsa, berdisiplin tinggi serta berkesenian yang memadai.

3) Aspek isi kurikulum

³⁴ Ibid., 6.

Isi kurikulum yang diprogramkan di Madrasah Aliyah ini meliputi aspek spiritual (keagamaan), kemasyarakatan, IPTEKS dan budaya. Mengajarkan ilmu-ilmu Agama, termasuk di dalamnya bahasa Arab sebagai alat mutlak untuk membaca kitab-kitab. Karena itu, semua pelajaran Agama dan bahasa Arab menjadi pelajaran pokok. Pendidikan Madrasah Aliyah termasuk lembaga pendidikan pendidikan Islam, sehingga isi kurikulumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) menonjolnya tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuan dan kandungan-kandungannya, metode-metode, alat-alat dan tekniknya bercorak agama Islam; (2) meluasnya perhatiannya dan menyeluruhnya kandungan-kandungan (isi kurikulum) yang betul-betul mencerminkan semangat pemikiran dan ajaran Islam yang menyeluruh, yang terlihat dalam perhatiannya pada pengembangan dan bimbingan peserta didik dilihat dari segi intelektual, psikologis, sosial dan spiritual; (3) adanya keseimbangan, yakni apa yang dipelajari, dipahami dan dikembangkan oleh peserta didik di madrasah tidak terlepas dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna lulusan. Oleh karena itu isi kurikulum madrasah tidak hanya muatan yang terkait dengan persoalan akhirat saja, akan tetapi termasuk persoalan dunia, sehingga out-put yang dihasilkan nanti tidak saja segi agama yang menonjol akan tetapi ilmu keduniawiaan-pun dikuasai; (4) kecenderungan pada seni halus, terkait dengan aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, bahasa asing dan sebagainya, sehingga dari segi bakat, perasaan keindahan

peserta didik dikembangkan; (5) penyesuaian kurikulum dengan kemampuan dan perbedaan individual peserta didik, tuntutan masyarakat, perubahan yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi.³⁵

Selanjutnya, al-Shaibany mengemukakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam kurikulum pendidikan Islam, yaitu: (1) pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya; (2) menyeluruh (universal) pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum; (3) keseimbangan yang relatif antara dan kandungan tujuan-tujuan atau isi kurikulum; (4) perkaitan dengan bakat, minat, kemampuan-kemampuan, dan kebutuhan peserta didik begitu juga dengan alam sekitar fisik dan sosial dimana peserta didik itu hidup dan berinteraksi untuk memperoleh pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan sikapnya; (5) pemeliharaan perbedaan-perbedaan individual di antara peserta didik dalam hal minat, bakat, kemampuan, kebutuhan dan masalah-masalahnya, dan juga memelihara perbedaan-perbedaan dan kelainan-kelainan di antara alam sekitar dan masyarakat; (6) perkembangan dan perubahan, yakni kurikulum pendidikan Islam itu siap untuk menerima dan melakukan suatu perubahan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan ilmu dan teknologi; dan (7) pertautan antara mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum.³⁶

Apabila suatu kurikulum dapat dirumuskan atas prinsip-prinsip di atas maka sudah pasti sekolah/madrasah itu akan mampu menghasilkan

³⁵ 'Umar Muhammad al-Ṭaūmy al-Shaibāny, Terj. Hasan Langgulung, *Falsafah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 489-512.

³⁶ *Ibid.*, 519-523 .

manusia paripurna, yaitu manusia yang dalam hidupnya selalu didasarkan atas iman dan taqwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati.³⁷

Materi pelajaran berorientasi pada *subject-centered* sekaligus *student-centered*. *Subject-centered* mempertimbangkan materi (tema dan topik) yang sesuai dengan pendidikan Islam. Tujuan yang ingin diharapkan adalah dapat memahami anak usia sekolah menengah agar secara psikologis mampu hidup, belajar, dan tumbuh dewasa sebagaimana yang diharapkan meskipun dalam suasana yang tidak kondusif sekalipun. Kedewasaan yang diharapkan yaitu dapat membangun sikap yang menghargai aturan dan norma positif dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan *student-centered* mengacu pada pertimbangan kondisi peserta didik, termasuk bagaimana agar mereka memiliki minat dan daya tarik untuk mempelajari materi pendidikan Islam yang dituangkan dalam kurikulum. *Student-centered* juga menempatkan peserta didik sebagai subjek yang berpotensi dan mampu berfikir dan bersikap melalui proses pembelajaran yang interaktif dan demokratis.

4) Aspek struktur kurikulum Pendidikan Madrasah Aliyah

Dilihat dari segi struktur kurikulum madrasah Aliyah yang diterbitkan oleh Departemen Agama dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum 2004 berbeda dengan sekolah umum lainnya. Perbedaannya tampak pada pengembangan pendidikan agama Islam yang terkait dengan

³⁷ Arifin, *Filsafat*, 87.

mata pelajaran: al-Qur'an al-Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam. Pada setiap program baik program bersama, program studi ilmu alam, program studi ilmu sosial, program studi ilmu agama Islam, program studi Bahasa maupun program keahlian kejurun, mata pelajaran tersebut diberikan. Dengan demikian jumlah jam di Madrasah Aliyah ini berbeda dengan tingkat Sekolah Menengah Umum lainnya.

5) Aspek tuntutan pendidikan Madrasah Aliyah

Kurikulum pendidikan madrasah Aliyah ke depan seharusnya lebih menitikberatkan pada pencapaian ilmu keagamaan, pengetahuan dan teknologi yang dijiwai dengan semangat iman dan taqwa. Bentuk kurikulum yang *integrated* antara agama (iman dan taqwa), pengetahuan dan teknologi merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat dari lulusan pendidikan Madrasah Aliyah. Oleh karena itu, pendidikan agama yang sesuai dengan perkembangan peserta didik dan tuntutan masyarakat, dalam konteks kita sekarang, yang diajarkan tidak hanya sekedar dogma-dogma ritual yang bersifat *fiqh-oriented*, tapi juga wawasan-wawasan keislaman yang lain, termasuk misalnya wawasan Islam mengenai kemoderenan, kemajuan ilmu pengetahuan dan kebangsaan. Oleh karena itu pendidikan Islam atau madrasah adalah integrasi keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan. Kenapa keindonesiaan? Karena kita hidup di Indonesia,

tidak di tempat lain. Kenapa kemanusiaan? Karena Islam itu *rahmatan li al-‘alamîn*, tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk umat lain³⁸.

c. Model Kurikulum Pendidikan Madrasah Aliyah

Perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta budaya termasuk perubahan globalisasi. Perkembangan dan perubahan yang terjadi secara terus menerus menuntut adanya perbaikan terutama dalam sistem pendidikan termasuk perubahan kurikulum. Hal ini merupakan jawaban dari tuntutan masyarakat akan hasil pendidikan.

Salah satu pengembangan model kurikulum di madrasah lebih berorientasi pada kurikulum terintegrasi (*Integrated Curriculum*). Kurikulum terintegrasi sengaja dirancang agar proses pendidikan benar-benar memenuhi maksud yang dikehendaki, yang meniadakan batas-batas antar mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan pelajaran yang menyajikan fakta yang tidak terlepas satu sama lain diharapkan mampu membentuk kepribadian peserta didik yang integral, selaras dengan kehidupan sekitarnya.

Kurikulum teritegrasi yang bercorak inklusif, humanis dan *scientific* diimplementasikan dengan mengikuti pola kurikulum sekolah umum (non agama) yang telah berlaku pada model madrasah. Jadi belajar

³⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 3.

agama seimbang dengan sains. Ada beberapa pola integrasi yang dikembangkan di madrasah yaitu :

- 1) Pola program kecakapan hidup (*Life skill*), atau setara dengan sekolah kejuruan. Madrasah memfasilitasi peserta didik yang mempunyai minat dan kemampuan tertentu untuk mengikuti program ketrampilan.
- 2) Pola program penyuluhan dan bimbingan. Dengan program ini peserta didik secara bergiliran dididik bersama-sama dengan komunitas industri atau membaur dengan masyarakat pengrajin.
- 3) Pola sekolah umum dan pesantren. Dimaksudkan pendidikan agama diberikan sebagai pendidikan non kurikuler di luar sekolah, tetapi tetap di lingkungan madrasah. Program ini sepenuhnya mengintegrasikan sekolah umum dan sistem pendidikan pesantren tradisional.

Implementasi kurikulum ini lebih berpusat pada kepentingan siswa (*student centered*), bersifat *life centered* (langsung berhubungan dengan lingkungan kehidupan) dihadapkan pada situasi yang mengandung problem (*problem posing*), memajukan perkembangan sosial, dan direncanakan bersama antara guru dan murid. Oleh karena itu mestinya ada pola hubungan yang dialogis dan kritis serta penguatan yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang memungkinkan pengembangan sikap kritis siswa, seperti sejarah, filsafat dan bahasa.

Di antara bentuk kurikulum terintegrasi adalah kurikulum berbasis Kompetensi. Kurikulum ini adalah perpaduan penguasaan pengetahuan,

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Gordon berpendapat bahwa ada 6 hal yang terkait dengan penguasaan ranah Kompetensi, yaitu : (1) *knowledge* (pengetahuan), (2) *understanding*, artinya kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu, (3) *skill*, artinya kemampuan individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya, (4) *value*, artinya suatu standar perilaku yang telah menyatu secara psikologis pada diri seseorang, (5) *attitude*, artinya perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar, (6) *interest*, artinya kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.³⁹

Atas dasar uraian kompetensi di atas maka kurikulum berbasis kompetensi ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab.

d. Pola Pembelajaran Pendidikan Madrasah Aliyah

Ada beberapa pola pembelajaran yang dikembangkan di Madrasah Aliyah, yang berorientasi kepada kepentingan peserta didik (*student centered*), diantaranya:

- 1) Berdasarkan kecapakan hidup (*Life Skill*)

³⁹ Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 57.

Pendidikan kecakapan hidup ini secara umum bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berfikir dan potensi dirinya agar dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya secara konstruktif, inovatif dan kreatif. Oleh karena itu pelaksanaan pendidikan *life skill* disesuaikan dengan kondisi siswa dan lingkungannya.

Ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi dalam pendidikan *life skill* ini, yaitu: (1) tidak mengubah sistem pendidikan yang telah berlaku; (2) tidak harus mengubah kurikulum tetapi yang diperlukan adalah penyiasaan kurikulum untuk diorientasikan pada kecakapan hidup; (3) etika sosio religius bangsa tidak boleh dikorbankan dalam pendidikan *life skill*, akan tetapi sedapat mungkin diintegrasikan dalam proses pendidikan; (4) pembelajaran *life skill* menggunakan *learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together*; (5) pelaksanaan pendidikan *life skill* di madrasah hendaklah menerapkan manajemen berbasis madrasah; (6) potensi daerah sekitar madrasah dapat direfleksikan dalam penyelenggaraannya; (7) *learning to life* dan *learning to work* dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan dengan kebutuhan nyata peserta didik; (8) diarahkan agar peserta didik menuju hidup sehat dan berkualitas mendapat pengetahuan, wawasan dan

ketrampilan yang luas serta memiliki akses untuk memenuhi standar hidup yang layak⁴⁰.

2) *Active Learning*

Ada beberapa istilah yang mendekati kesamaan dalam konsep *active learning* yaitu: *quantum learning*, *accelerated learning*, *learning revolution*. Konsep ini berasumsi bahwa manusia jika mampu menggunakan potensi nalar dan emosinya, maka akan mampu membuat loncatan prestasi yang tidak bisa diduga sebelumnya. Proses pengembangan dan pelatihan terhadap potensi itulah yang menyebabkan peserta didik berkualitas. Diakui secara jujur bahwa sebenarnya konsep ini telah ada pada lembaga pendidikan pesantren atau madrasah hanya sayangnya tidak dikembangkan, secara sistematis.

3) *Quantum Teaching*

Quantum berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Jadi *quantum teaching* artinya perubahan bermacam-macam interaksi yang ada didalam dan sekitar momen belajar. Sehingga mampu mengubah cara belajar dan mengarah pada kesuksesan peserta didik. Pada awalnya *quantum teaching* merupakan suatu program percepatan dan *quantum learning* yang menekankan pada perkembangan keterampilan akademis dan pribadi. Tujuan *quantum*

⁴⁰Ainurrafiq Dawam, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren* (Jakarta: Lastafarista Putra, 2005), 106.

teaching ini adalah untuk mencetak peserta didik memiliki keterampilan akademis dan keterampilan hidup.

4) Pendidikan Humanistik

Pendidikan humanistik ini lebih berorientasi kepada pertumbuhan dan perkembangan kreativitas dan kepribadian peserta didik untuk menjadi individu yang merdeka.

e. **Problematika Kurikulum di Madrasah**

Dalam konteks pengembangan kurikulum madrasah, akan terkait dengan komponen-komponen pendidikan lainnya, seperti sarana dan prasarana, tuntutan dan kebutuhan lingkungan masyarakat, sumberdaya manusia (SDM) yang memadai, manajemen/kepemimpinan, serta tuntutan perkembangan IPTEKS. Sehubungan dengan itu, kurikulum madrasah masih menghadapi problematika yang kompleks, sebagaimana uraian berikut:

1) **Pendidikan yang dililit berbagai keterbatasan**

Bukan rahasia umum lagi bahwa pada umumnya pendidikan madrasah itu diselenggarakan dengan berbagai keterbatasan sarana prasarana dan dukungan dana. Kedua kondisi ini menjadi faktor sangat menonjol pada pendidikan madrasah, walaupun sejak dua dekade terakhir ini sudah banyak pula dijumpai madrasah dengan kondisi sarana dan prasarana yang melebihi sekolah umum negeri. Namun masih banyak ditemui di berbagai tempat proses kegiatan belajar mengajar di madrasah,

khususnya pada madrasah swasta, yang diselenggarakan di dalam gedung madrasah dengan dinding yang terbuat dari papan atau anyaman bambu serta dengan ruang kelas yang kusam, kumuh dengan sarana belajar seadanya. Murid-murid duduk berdesakan belajar di atas kursi papan atau bambu dengan perlengkapan alat tulis seadanya. Bahkan tidak jarang ditemui seorang murid hanya memiliki sebuah buku tulis untuk mencatat semua pelajaran yang diberikan guru. Sementara guru mengajarkan pelajaran dengan perlengkapan kursi dan meja yang sudah tua serta masih menggunakan alat tulis kapur dan papan tulis hitam yang warnanya sudah mulai berubah kekuning-kuningan.

Seluruh penyelenggaraan pendidikan pada madrasah swasta dijalankan dengan dukungan dana yang minim yang hanya bersumber dari dana swasembada para pendiri, zakat dan sedekah masyarakat, serta iuran sekolah murid-murid yang tidak dapat dipastikan jumlahnya setiap bulan. Bahkan banyak diantara guru yang mengajar dengan honorarium sebesar Rp.200.000 s/d 300.000 perbulan atau kurang lebih Rp. 5.000 perjam, sebuah penghasilan yang tidak bisa diandalkan sebagai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari-hari yang layak. Dalam kenyataannya penghasilan yang ada itu kemudian hanya bisa menutup transportasi mengajar. Dapat dibayangkan kualitas output pendidikan seperti apa yang dapat dihasilkan oleh pendidikan madrasah seperti ini.⁴¹

⁴¹ Uraian yang senada terdapat dalam tulisan Imam Suprayogo, yang berjudul *Mencermati Aspek Manajemen Madrasah*, yang disampaikan dalam *Rountable Discussion* Masa Depan Madrasah yang diselenggarakan INCIS pada tanggal 27 Juli 2004.

Kondisi tersebut sedikit berbeda dengan madrasah yang sudah dinegerikan, dimana penyelenggaraan kegiatan pendidikan sudah mendapat subsidi dari pemerintah, mulai dari biaya penyelenggaraan KBM sampai pada pemeliharaan gedung. Bahkan sebagian para guru juga sudah berstatus PNS yang mendapat gaji dan tunjangan tetap dari pemerintah. Namun secara keseluruhan kondisi ini belum merata, karena jumlah madrasah yang berstatus negeri tidak lebih dari 15% dari populasi yang ada. Jadi masalah keterbatasan sarana dan prasarana ini dialami oleh hampir 85% madrasah yang berstatus swasta.

Gambaran di atas merupakan kondisi umum yang dapat dijumpai pada dunia pendidikan madrasah. Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama RI bukannya tidak berbuat sesuatu. Berbagai program peningkatan mutu pendidikan madrasah telah diluncurkan, mulai dari program madrasah wajib belajar tahun 1998, berbagai bantuan peningkatan sarana belajar, berbagai biaya operasional belajar serta sejumlah pelatihan dan *up-grading* guru, pengawas dan kepala sekolah selama pemerintahan orde baru; di samping beberapa program masif seperti *Basic Education Proyek* (BEP) dan *Development of Madrasah Aliyah Proyek* (DMAP) yang secara integral bertujuan untuk mencari solusi yang efektif untuk memecahkan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi pendidikan madrasah. Begitu juga pada era reformasi ini berbagai upaya telah dilakukan seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Bantuan Operasional Manajemen Madrasah (BOMM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta berbagai

bentuk bantuan pendidikan lainnya telah diluncurkan secara masif untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan madrasah, yang pada gilirannya diharapkan akan memacu peningkatan kualitas pendidikan madrasah. Begitu juga sejak sepuluh tahun terakhir ini Departemen Agama RI telah memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan madrasah secara signifikan, walaupun secara kuantitas masih jauh jumlahnya dari yang diperoleh sekolah umum.

Namun berbagai kebijakan yang dilakukan di atas dipandang belum cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Keterbatasan dana yang dapat disediakan pemerintah serta rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya dunia usaha terhadap perkembangan pendidikan madrasah. Oleh karena itu, disamping tetap memperjuangkan peningkatan subsidi biaya pendidikan dari pemerintah, maka perlu dikembangkan program peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha bahwa perwujudan pendidikan agama yang berkualitas tidak hanya tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini hanya Departemen Agama RI saja, tetapi tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk para orang tua, masyarakat Muslim dan masyarakat dunia usaha. Selain itu perlu dikembangkan pula program-program kemitraan dengan berbagai lembaga pendidikan dan usaha sehingga masalah keterbatasan sarana dan prasarana yang dialami tidak lagi menjadi persoalan klasik yang tidak pernah selesai.

2) Kurikulum yang belum menjawab kebutuhan

Kelemahan sistem pendidikan madrasah menurut Mastuhu, pada dasarnya sama dengan kelemahan umum yang disandang oleh sistem pendidikan di Indonesia. Kelemahan tersebut terletak pada hal-hal berikut:⁴²

- 1) Mementingkan materi di atas metodologi.
- 2) Mementingkan memori di atas analisis dan dialog.
- 3) Mementingkan pikiran vertikal di atas literal.
- 4) Mementingkan penguatan pada "otak kiri" di atas "otak kanan".
- 5) Materi pelajaran agama yang diberikan masih bersifat tradisional, belum menyentuh aspek rasional.
- 6) Penekanan yang berlebihan pada ilmu sebagai produk final, bukan pada proses metodologinya.
- 7) Mementingkan orientasi "memiliki" di atas "menjadi".

Titik-titik lemah itulah yang menyebabkan madrasah, disamping lembaga pendidikan lainnya di Indonesia, kurang mampu menghasilkan *output* atau lulusan sebagaimana yang diharapkan. Padahal sebuah lembaga pendidikan, apapun nama dan jenisnya, bagaimanapun harus mengaitkan keberadaannya dengan lingkungan sosial yang mengasuh dan membesarkannya. Sebab tanpa adanya kaitan yang jelas antara keduanya, maka keberadaan sebuah lembaga pendidikan menjadi tidak relevan, kalau bukan malah sia-sia.

⁴² Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 59.

Disamping titik lemah di atas, hingga kini masih kuat anggapan dalam masyarakat luas yang mengatakan bahwa antara ‘agama’ dan ‘ilmu’, ‘madrasah’ dan ‘sekolah’ adalah dua entitas yang tidak bisa dipertemukan. Keduanya mempunyai wilayah sendiri-sendiri, terpisah antara satu sama lain, baik dari segi objek formal-material keilmuan, guru yang diangkat, metode pengajaran yang diterapkan, sampai pada bentuk perpustakaan yang perlu disediakan⁴³. Sementara itu, dalam merespon kondisi ini, dalam dunia pendidikan Islam muncul dua fenomena: *Pertama*, yang umum terjadi adalah pengajaran ilmu-ilmu agama Islam yang normatif-tekstual baik di sekolah maupun di madrasah terlepas dari perkembangan ilmu-ilmu sosial, ekonomi, hukum, dan humaniora. *Kedua* pendidikan ilmu-ilmu kealaman ‘dipaksa’ kawin dengan ilmu-ilmu keagamaan Islam yang normatif tekstual dengan cara melekatkan atau menempelkan ayat-ayat al-Qur’an pada temuan dan keberhasilan IPTEK, namun terlepas begitu saja dari perkembangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora tersebut.

Kelemahan pokok pendidikan madrasah adalah kurangnya perhatian terhadap pengajaran bidang studi umum. Kekurang akrabannya madrasah dengan bidang studi umum tersebut, merupakan warisan sejarah Islam di Indonesia. Seperti diketahui bahwa Islam yang masuk dan berkembang di Indonesia adalah Islam yang bercorak tasawuf atau sufistik, yang lebih mementingkan kehidupan agama dari pada kehidupan dunia. Oleh karena itu

⁴³ M Amin Abdullah, *Keilmuan Umum dan Agama Dalam Sistem Sekolah dan Madrasah*. Kertas kerja yang disampaikan dalam Roundtable Discussion Masa Depan Madrasah yang diselenggarakan oleh INCIS, tanggal 27 Juli 2004 di Wisma Antara Jakarta.

corak pendidikan Islam di Indonesia lebih berorientasi pada pengajaran agama. Masuknya pemerintah kolonial Belanda dengan membawa sistem persekolahan yang sekuler, telah melahirkan dikotomi sistem madrasah dengan sistem sekolah. Keadaan ini telah menggiring pendidikan Islam (madrasah dan pesantren) menjadi terisolir dari *mainstream* pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda; bahkan pada sebagian besarnya Madrasah atau Pondok Pesantren sebagai benteng perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Keadaan ini menjadi salah satu penyebab kurang tertarikan pendidikan madrasah terhadap bidang studi umum, seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi. Faktor penyebab lain adalah tidak terdapatnya guru bidang studi umum yang berkualitas yang pada gilirannya mempengaruhi sikap ketertarikan murid terhadap pengajaran bidang studi umum.⁴⁴

Beberapa tahun terakhir ini, Departemen Agama RI melalui Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam (Ditbinrui), yang sekarang telah berubah nama menjadi Direktorat Pendidikan Madrasah telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk menghilangkan dikotomi dan disorientasi ilmu ini melalui pengembangan program MAFIKIBB (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan Bahasa Inggris) dengan nuansa Islam dan program pelajaran agama yang bernuansa IPTEK. Kedua program ini bertujuan untuk menjembatani *gap* atau jurang antara pendidikan agama dengan bidang studi umum dan untuk memberikan

⁴⁴ Husni Rahim, *Anatomi Madrasah*, Makalah pada *Rountable Discussion* yang diselenggarakan oleh INCIS pada tanggal 27 Juli 2004 di Wisma Antara Jakarta.

nuansa IPTEK ke dalam mata pelajaran agama. Melalui kedua program ini diharapkan akan terjadi perpaduan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Bila upaya integrasi ilmu ini berhasil, maka diharapkan tidak ada lagi kesan dikotomi antara pelajaran agama dan pelajaran umum. Perpaduan konsep MAFIKIBB dengan nuansa agama dan konsep agama dengan nuansa IPTEK dimaksudkan agar dapat diserapnya nilai-nilai MAFIKIBB yang agamis, dan nilai-nilai agama yang kontekstual dalam perilaku siswa, sebagai wujud penghayatan dan pengabdian kepada keagungan Allah swt.⁴⁵

Jika semula perbandingan muatan pelajaran agama dan umum 70 : 30, maka sejak tahun 1994 menjadi berbanding terbalik 30 : 70 dan mulai tahun ajaran 2000/2001 kurikulum madrasah 100 % sama dengan kurikulum sekolah dengan penekanan pada pendidikan agama berciri khas Islam. Dengan perubahan ini, maka para lulusan pendidikan madrasah mengalami perubahan orientasi dalam memilih program studi di perguruan tinggi, dimana sekarang ini di UIN, IAIN, STAIN dan Perguruan Tinggi Agama lainnya mulai tersedia berbagai pilihan program studi umum disamping program studi agama yang sudah berjalan selama ini. Seiring dengan terbukanya peluang pilihan program studi yang lebih luas di tingkat perguruan tinggi, telah mendorong madrasah untuk juga membuka program-program studi umum. Maka sejak awal tahun 1990-an pada madrasah, khususnya di tingkat Madrasah Aliyah telah dikembangkan program-program

⁴⁵ Ibid.

umum, seperti program IPA, program IPS, program Bahasa serta program Keterampilan, disamping program agama (reguler) yang sudah ada selama ini.

Perkembangan di atas pada satu sisi telah membawa perubahan wawasan keilmuan pada pendidikan madrasah, dimana pendidikan madrasah tidak lagi berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi sekaligus juga telah mengambil peran ganda pula sebagai lembaga pendidikan umum. Perubahan ini telah menjadikan pendidikan pada madrasah tidak lagi hanya terfokus untuk menyiapkan *row input* yang akan masuk pada jurusan/program agama di tingkat perguruan tinggi agama, tetapi juga dituntut untuk menyiapkan *row input* yang akan memilih jurusan/program studi umum di tingkat perguruan tinggi. Akibatnya adalah perhatian pada pengembangan program agama mulai melemah, karena konsentrasi pembelajaran lebih difokuskan pada peningkatan program bidang studi umum. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan output pendidikan madrasah menjadi 'serba tanggung', dimana penguasaan mata pelajaran umum kurang mantap karena pembinaan bidang studi ini dilakukan oleh guru-guru yang bukan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang seharusnya, sebaliknya fokus pengajaran bidang studi agama, terutama penguasaan mata pelajaran bahasa Arab mulai melemah,

karena konsentrasi lebih banyak diberikan pada pengembangan materi pelajaran umum⁴⁶.

Sebagai lembaga pendidikan nasional berciri khas Islam, madrasah tentu identik dengan penguasaan ilmu-ilmu keagamaan beserta perangkat pendukung utamanya, yaitu bahasa Arab. Para lulusan madrasah seyogyanya memiliki kebanggaan tersendiri karena kemampuannya dalam membaca, menulis, dan memahami bahasa Arab, yang merupakan kunci untuk memahami al-Qur'an dan Hadits serta kitab-kitab keagamaan klasik. Sayangnya, beberapa penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Arab para lulusan madrasah semakin menurun, kalau tidak bisa dikatakan sangat lemah.

Salah satu contoh untuk mendukung pernyataan tersebut bisa dilihat dari kasus para calon mahasiswa IAIN Jakarta (yang sejak tahun 2002 telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri) pada tahun 1995 berikut ini:⁴⁷ Persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa baru di IAIN Jakarta pada 1995 adalah bahwa calon harus mendapat nilai tes bahasa Arab minimal 6 dari 10. Hasilnya lebih kurang hanya lima anak yang mendapat nilai tes bahasa Arab 7-9; 13 anak memperoleh nilai antara 5-7, dari lebih kurang hampir 5000 calon yang mayoritas adalah para lulusan madrasah.

Pada mulanya IAIN Jakarta menargetkan menerima 10-20% atau 800-1000 dari jumlah pelamar. Tapi mengingat rendahnya hasil tes masuk, maka IAIN Jakarta terpaksa menurunkan persyaratannya, yaitu untuk

⁴⁶ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Mellinium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), 60.

⁴⁷ Rahim, *Anatomi*.

bahasa Arab menjadi 5 atau kurang sedikit. Keadaan serupa ternyata tidak hanya terjadi di IAIN Jakarta, tapi juga di IAIN dari daerah lain dan PTAIS. Dengan kata lain, di IAIN dan PTAIS lain pun banyak calon mahasiswa yang tidak bisa menulis Arab seperti menulis surat al-Fāṭīḥah dan ayat-ayat pendek lain.

Karena persyaratan itu kemudian diturunkan, maka akhirnya mereka tetap bisa diterima di IAIN. Tetapi setelah mereka menjadi mahasiswa, kemampuan bahasa Arab mereka tetap tidak bisa diharapkan, karena metode pengajaran bahasa yang diterapkan di IAIN masih relatif tradisional. Akibatnya, pengajaran bahasa Arab yang diberikan IAIN melalui lembaga bahasa juga tidak mampu berbuat banyak untuk memperbaiki kelemahan bahasa Arab yang diwarisi siswa dari madrasah sebelumnya itu.⁴⁸

Kenyataan tersebut mungkin sulit dipercaya. Bagaimana mungkin lulusan sebuah lembaga pendidikan Islam seperti madrasah tidak bisa menulis dalam bahasa Arab, bahkan sekedar surat al-Fāṭīḥah dan ayat-ayat pendek. Anggaphlah itu benar, berarti ada sesuatu yang harus dibenahi di dalam sistem pendidikan madrasah, terutama menyangkut pengajaran bahasa Arab. Dalam hal ini kita akan menyoroṭi dua hal, yaitu metode pengajaran dan sikap mental budaya terhadap bahasa Arab itu sendiri.

⁴⁸ Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 126.

Metode pengajaran bahasa Arab di madrasah berbeda dengan pesantren. Di pesantren bahasa Arab dipelajari sekaligus dipraktikkan dalam percakapan sehari-hari. Ini bukan soal lingkungan pesantren yang mendukung untuk terciptanya keadaan tersebut, melainkan soal komitmen dan disiplin dalam berbahasa itu sendiri. Banyak sekolah agama berasrama, tapi tidak mampu menciptakan disiplin untuk mendukung situasi yang memungkinkan para siswanya tunduk pada peraturan untuk berbahasa Arab. Akibatnya, para siswanya tetap tidak mampu berbahasa Arab, baik lisan maupun tulis.

Sementara itu di madrasah, sama halnya dengan di IAIN, seperti dikatakan Azyumardi Azra, apa yang diajarkan sebenarnya bukan pelajaran bahasa, melainkan pelajaran tentang bahasa. Kegiatan belajar bahasa lebih banyak menitikberatkan pada hafalan kaedah-kaedah tata bahasa tanpa ada kesempatan untuk menggunakan bahasa itu dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kalau mau ditelusuri lebih jauh lagi, metode pengajaran yang demikian sebenarnya merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan yang bersifat satu arah dan berlangsung naratif, di mana guru memberikan informasi yang harus ditelan, diingat dan dihafal oleh murid agar mereka bisa lulus dalam ujian.⁴⁹

Berangkat dari kondisi tersebut, nampaknya sudah mendesak untuk dilakukan reposisi kembali pendidikan madrasah dengan merumuskan kembali visi dan misi serta tujuan pendidikan madrasah ke depan. Apakah

⁴⁹ Ibid.

orientasi akademis yang dikembangkan selama ini sudah tepat dan tetap dipertahankan? Nampaknya kita perlu melakukan pemikiran ulang tentang kebijakan pengembangan madrasah yang terlalu berat berorientasi kepada penyediaan pelayanan yang mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, namun setelah selesai kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai latar belakang pendidikannya. Padahal di sisi lain ada kebutuhan mendesak masyarakat akan tenaga-tenaga profesi keagamaan, seperti kebutuhan akan tenaga khātib yang mumpuni, tenaga da'i yang terampil dan berwawasan luas; tenaga-tenaga yang profesional untuk mengurus urusan jenazah dan masalah profesi agama lainnya.

Untuk itu sudah saatnya, penyeimbangan pengembangan kurikulum madrasah antara yang berorientasi pengembangan akademik dengan yang berorientasi pengembangan profesi keagamaan. Perwujudannya dapat dilakukan dengan membuka unit madrasah baru atau dalam pembukaan program-program studi bidang profesi keagamaan. Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Bab VI Jalur dan Jenis Pendidikan, bagian ketiga mengenai Pendidikan Menengah, pasal 18 ayat (3) menyebutkan Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Undang-undang ini memberi peluang baru bagi pendidikan madrasah untuk mendirikan MA Kejuruan. Ada beberapa kemungkinan yang dapat dikembangkan dari wadah yang telah tersedia ini. *Pertama*, berbentuk pendidikan kecakapan hidup (*life*

skill), yaitu model pendidikan yang memberikan kecakapan vokasional untuk bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Strateginya adalah merubah program keterampilan yang terdapat di beberapa madrasah reguler ditingkatkan menjadi Madrasah Aliyah Keterampilan. Cara ini dipandang sangat memungkinkan karena sudah terbentuk *workshop-workshop* keterampilan berbagai jenis program keterampilan, seperti keterampilan las, gas dan listrik; otomotif, perahu tempel, pertukangan, ternak unggas dan ikan air tawar, tata boga dan hasil pertanian. *Kedua*, membuka Unit Madrasah Baru (UMB) dengan corak kurikulum yang berorientasi kepada pengembangan tenaga-tenaga profesi keagamaan seperti disebutkan di atas. Pilihan kedua ini dapat pula dilakukan dengan cara mengembangkan program profesi keagamaan pada sebagian Madrasah Aliyah Keagamaan yang sudah ada. Alternatif terakhir nampaknya lebih memungkinkan untuk dilakukan daripada membuka unit madrasah baru.

3) Kurang tersedianya SDM yang memadai

Masalah mendasar lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan pendidikan madrasah ke depan adalah pengembangan sumber daya manusia, khususnya tenaga guru, kepala madrasah dan tenaga pengawas.

a) Kualitas guru yang sangat rendah

Melihat gambaran kondisi tenaga guru di madrasah saat ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. *Pertama* guru yang tidak

layak/dibawah kualifikasi (*unqualified/underqualified*). Artinya guru tersebut belum mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Misalnya untuk mengajar di MI, guru minimal berijazah D II, di MTs lulusan D III dan di MA lulusan S1. *Kedua*, guru layak tapi salah kamar (*mismatch*). Artinya latar belakang pendidikannya tidak cocok dengan bidang studi yang diajarnya. Misalnya lulusan Fakultas Tarbiyah jurusan PAI mengajar matematika, atau lulusan Fakultas Syariah mengajar IPS dan seterusnya. *Ketiga*, guru yang layak atau sesuai dengan kualifikasi yang ada, dimana mata pelajaran yang diajarkannya sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.⁵⁰

Jika dilihat data guru madrasah saat ini, hampir 60 % guru madrasah negeri termasuk kategori tidak layak dan angka akan melonjak menjadi 80 % pada madrasah swasta. Sedangkan yang *mismatch* (salah kamar) sebesar 20 %. Jadi hanya sekitar 20 % guru madrasah yang benar-benar layak dan memenuhi kualifikasi mengajar. Inilah sebenarnya tantangan berat yang dihadapi madrasah. Tantangan ini semakin berat bila dilihat kualitas bidang studi umum yang masih sangat lemah, karena bidang studi ini ditangani oleh guru-guru dalam kategori *mismatch* tadi. Oleh karena itu wajar bila hasil EBTANAS bidang studi umum pada madrasah lebih rendah dibandingkan dengan sekolah umum. Keadaan ini semakin menonjol setelah diterapkannya kurikulum 1994,

⁵⁰ Husni Rahim, *Arah baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2000).

dimana kurikulum madrasah sama dengan kurikulum sekolah umum. Artinya murid madrasah dituntut harus mencapai standar kurikulum yang sama dengan siswa sekolah umum, padahal bagi madrasah (para guru dan siswa) penerapan kurikulum ini masih baru dan belum dapat dijalankan secara optimal dengan berbagai keterbatasan. Guru madrasah tidak dipersiapkan untuk melaksanakan kurikulum 1994 tersebut, begitu pula para siswa belum terbiasa dengan pendidikan yang bukan bidang studi agama.⁵¹

Melihat kondisi ini, Departemen Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam sejak tahun 1995 melakukan beberapa upaya peningkatan kualitas guru madrasah dengan meluncurkan program sertifikasi bagi guru-guru yang salah kamar; pemberian bantuan beasiswa ke jenjang D II, D III maupun S1, disamping *up-grading* guru yang selama ini dilakukan. Program peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya mendapat momentum baru ketika Departemen Agama RI mulai mendapatkan dana bantuan/pinjaman luar negeri melalui *Asian Development Bank (ADB)*, *World Bank* dan *Islamic Development Bank (IDB)*. ADB misalnya mulai membantu peningkatan mutu MTs melalui *Junior Secondary Education Project (JSEP)* pada tahun 1994, dan berlanjut kemudian dengan *Basic Education Proyek (BEP)* tahun 1996 dan *Development of Madrasah Aliyah Project (DMAP)*. Melalui kedua proyek yang terakhir

⁵¹ Ibid.

ini dilakukan program peningkatan mutu guru secara masif melalui berbagai kegiatan di bawah kategori program *staff development*. Ribuan guru yang *unqualified* diikutsertakan dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan, seperti pelatihan guru bina (*master teacher*), guru bidang studi mafikibb, pendidikan S2, S3 di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Begitu pula melalui IDB telah dilakukan pula pelatihan berbagai program keterampilan bagi guru-guru yang mengajar pada MA yang memiliki program keterampilan⁵².

Namun, dengan telah mulai berakhir program peningkatan SDM ini melalui pembiayaan bantuan luar negeri, maka program peningkatan mutu guru madrasah mengalami penurunan jumlah dan pendanaan yang signifikan. Kendala pendanaan semakin sulit ketika terjadi pula perubahan manajemen pendidikan akibat tuntutan kebijakan otonomisasi daerah. Hal ini terlihat bahwa pola pembinaan yang dilakukan sekarang terhadap peningkatan mutu madrasah adalah melalui pola *block grant* (bantuan dana segar) langsung ke kabupaten atau madrasah. Masalahnya kemudian adalah tidak semua kabupaten madrasah mempunyai kesiapan untuk melaksanakan sesuai dengan tuntutan/kebutuhan program, disebabkan karena berbagai kendala seperti kurangnya visi dalam melihat program, keterbatasan tenaga ahli,

⁵² DMAP., *Buku Pedoman Bantuan Luar Negeri ADB Loan-INO, 1519, 1999.*

serta masih kuatnya mentalitas ‘proyek’ dalam melaksanakan kegiatan pembinaan.

b) Kualitas Kepala dan Pengawas Madrasah yang rendah

Tidak jauh berbeda dengan kualitas guru, maka kualitas tenaga kependidikan lain seperti kepala madrasah dan tenaga pengawas juga sangat rendah. Data EMIS tahun 2003 menyebutkan bahwa pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdapat 23.093 kepala madrasah yang terdiri 62 % berpendidikan D II dan D III, dan sisanya berlatar belakang pendidikan S1 sebanyak 38 %; sedang pada tingkat MTs terdapat kepala madrasah, dengan latar belakang pendidikan D III ke atas 74,58 %, dan 25,42 % di bawah D III/Sarjana; sedangkan pada tingkat Madrasah Aliyah (MA) terdapat 4003 kepala madrasah dengan latar belakang pendidikan sarjana (S1) 87,5 %, S2 5,8 % dan sisanya 6,6% di bawah S1. Secara formal kondisi ini sebenarnya cukup memadai, tetapi dari sudut kualitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial masih sangat lemah, karena pada umumnya mereka adalah lulusan dari IAIN atau perguruan agama Islam lainnya. Artinya dari dimensi pengetahuan keagamaan tidak perlu diragukan lagi, tetapi dari dimensi kemampuan leadership dan manajerial sangat kurang sekali. Hal ini wajar, karena selama menuntut ilmu di IAIN atau perguruan agama Islam lainnya tidak pernah mendapatkan mata kuliah leadership dan manajemen. Bahkan lebih parah lagi banyak para kepala madrasah tersebut berasal dari mantan pejabat

administratif pada kandepag atau kanwil yang memperpanjang dinas aktifnya dengan mutasi menjadi pejabat fungsional kepala madrasah. Akibatnya banyak madrasah yang dikelola dengan penekanan aspek administratif dari pada dimensi akademisnya. Yang terjadi adalah madrasah dikelola secara amatiran dan bernuansa sangat birokratis.

Dengan kondisi seperti di atas dapat dibayangkan, kualitas penyelenggaraan pendidikan madrasah seperti apa yang akan muncul. Wajar bila kemudian tingkat kemajuan pendidikan madrasah sangat berjalan lamban dan tanpa adanya kreatifitas-kreatifitas yang muncul, karena pengelolaan pendidikan madrasah lebih bernuansa ‘birokratis’ dari pada bernuansa ‘akademis’. Walaupun beratus-ratus program penataran dan *up-grading* diselenggarakan untuk meningkatkan mutu kepala madrasah, tetapi karena row-inputnya ‘sedang-sedang saja’, maka sampai kapanpun mutu madrasah tidak akan banyak berubah. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan lagi terlalu lama, karena akan membawa madrasah akan semakin terpuruk mutunya. Untuk itu, sudah perlu dilahirkan sebuah kebijakan yang jelas dan terarah untuk prekrutan calon kepala madrasah. Misalnya perlu ditetapkan kualifikasi administratif, akademis, sosial, moral keagamaan yang ketat. Misalnya, dari sudut persyaratan administratif, kandidat calon kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan MTs misalnya lulusan S1 dan Kepala Madrasah Aliyah lulusan S2 dan semuanya harus berlatar belakang pendidikan dan keguruan serta mempunyai pengalaman mengajar sebagai guru

kurang lebih lima tahun; sedangkan dari sudut moralitas keagamaan yang bersangkutan mempunyai integritas moral yang baik dan belum pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar moral dan etika sosial. Jika kondisi-kondisi ini bisa ditegakan, baru kita bisa berharap pendidikan madrasah ke depan akan meningkat kualitasnya.

Kondisi yang sama juga terjadi pada mutu tenaga pengawas. Sudah bukan rahasia lagi bahwa, sebagian besar tenaga pengawas madrasah adalah berasal dari tenaga administratif, seperti mantan kepala seksi atau kepala madrasah yang bermutasi menjadi tenaga pengawas dalam rangka memperpanjang usia dinas aktif (usia pensiun). Sudah dapat pula dibayangkan, kualitas pengawasan seperti apa yang dapat mereka lakukan. Dengan keterbatasan pengetahuan tentang seluk beluk proses belajar mengajar (KBM) ditambah dengan keterbatasan pengetahuan di bidang administrasi dan supervisi pendidikan, dapat diperkirakan hasil pengawasan seperti apa yang dapat dihasilkan. Dalam kenyataannya para tenaga pengawas tersebut tidak lebih hanya memainkan peran dan fungsi sebagai ‘inspektur administratif’ dan tidak sempat mensupervisi masalah substansi dan proses KBM yang berlangsung pada pendidikan madrasah. Ke depan rekrutmen calon pengawas perlu dirancang sedemikian rupa dengan persyaratan administratif dan akademis yang ketat. Ke depan tidak semua orang lagi berpeluang menjadi tenaga pengawas, tetapi jabatan pengawas merupakan tenaga profesional dengan kualifikasi-kualifikasi

yang jelas, baik secara administratif, akademis, maupun moral keagamaan.

4) Tantangan IPTEK dan Globalisasi

Pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi pada lembaga-lembaga pendidikan Islam, merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Karena IPTEK adalah keseluruhan pengetahuan yang didapat melalui pengamatan, rasional, dan dilakukan pengujian secara kritis dan disepakati oleh para pakar dalam bidang ilmu. Dalam konteks ini, IPTEK memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Karena itu Tilaar⁵³, mengatakan bahwa IPTEK bagaikan pedang bermata tiga; *Pertama*, ia memberikan terobosan-terobosan yang besar yang dapat menguak dunia baru yang penuh potensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan manusia. *Kedua*, ia membuat terobosan baru bagi manusia terhadap rahasia alam semesta yang tidak atau belum terjangkau daya penalaran terbatas. *Ketiga*, ia telah menimbulkan kegoncangan-kegoncangan terhadap pegangan-pegangan hidup manusia seperti sosial, budaya, politik dan kepercayaan atau agama, sehingga dapat menghancurkan kehidupan manusia.

Dengan kata lain, kehadiran IPTEK yang merupakan piranti kehidupan manusia pada satu sisi dapat memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam mengatasi problem kehidupan. IPTEK juga memiliki nilai positif dan kepraktisan lainnya bagi

⁵³ HAR. Tilaar, *Pengembangan*, 87.

peningkatan kualitas sejarah peradaban manusia yang terus mengalami perubahan dan perkembangan. Futurolog Alvin Toefler dalam ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 28 Oktober 1996 mengingatkan kembali bahwa perpindahan peradaban manusia dari gelombang pertama (*first wave*) ke gelombang kedua (*second wave*) menuju gelombang ketiga (*third wave*) sangat membutuhkan peran IPTEK.⁵⁴ Modernisasi yang tengah melanda umat manusia dewasa ini pun akan semakin rnenghebat pada abad XXI dimotori oleh perkembangan IPTEK.

Pengaruh positif dari kemajuan IPTEK, menjadikan masyarakat dunia kini sedang menuju masyarakat ke pascaindustri (Gailbraith), masyarakat informasi (Koyama), abad sybernika dan abad elektronika (Marshal Me. Luhan), masyarakat ilmu pengetahuan (Peter Drucker), masyarakat tecnotronik (Zbigniew Brezezinski), masyarakat telematik (Nora & Minc), abad Infigglut (Marien) dan abad gelombang ketiga (Alvin Toeffler). Apabila masyarakat industri relatif telah siap menerima goncangan gelombang sekaligus, maka dampaknya sungguh sangat baik dalam arti positif maupun negatif.⁵⁵

Di sisi lain, kemajuan IPTEK justru telah menimbulkan dehumanisasi, demoralisasi, individualisme, materialisme dan nilai-nilai negatif lainnya. Sehingga pada sisi ini kehadiran IPTEK menampilkan diri dengan wujud yang tidak ramah lingkungan. Suprojo Pusposutardjo melihat bahwa perkembangan IPTEK dapat saja mengancam korban jiwa, waktu

⁵⁴ Alvin Toefler, *Laporan jawa Post*, 29 Oktober, 1996, 1.

⁵⁵ Baiquni, *Iptek*, 43.

dan material karena dipakai sebagai bahan uji yang tidak positif dan hal itu sangat bertentangan dengan jiwa Qurani.⁵⁶ Jadi, kehadiran IPTEK dapat menimbulkan krisis kehidupan umat manusia. Salah satu pengaruh yang sangat besar dari kemajuan IPTEK bagi kehidupan manusia adalah lahirnya sekularisme.

Persoalan tersebut kemungkinan tidak akan menimpa umat Islam bila pengajaran IPTEK diberikan secara benar di lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Karena itu, kalau para guru madrasah ingin mengajarkannya IPTEK kepada para muridnya tanpa menimbulkan kebingungan mereka, maka sains dan teknologi ini harus diajarkan dengan juga mengajarkan konteks kulturalnya. Mengajarkan sains dan Teknologi yang lepas dari kontek kulturalnya, selain membingungkan juga berbahaya. Penyalahgunaan sains dan teknologi saat ini dianggap sebagian kalangan, terutama kalangan agamawan, karena lepas dari akar kultural, etika ilmunya.⁵⁷ Madrasah menjadi salah satu tumpuan untuk menyerap segala macam persoalan teknologi berikut etika dan filsafatnya untuk kemudian melakukan reorientasi pada model pengajarannya, sehingga ia mampu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Terkait dengan itu, pendidikan teknologi harus diimbangi pula dengan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah perangkat pendidikan dan pembelajaran yang menunjang terciptanya segala aktifitas

⁵⁶ A. Syafi'i Anwar, *Sikap Positif Kepada AM. Kitab*, dalam Jurnal Ulumul Quran, No 4. Vol. IV, 1993.

⁵⁷ Mochtar Buchori, *Agama dan Iptek*, (Artikel Majalah *Educatio*) (Jakarta:IKIP Muhammadiyah, 1987), 23.

belajar mengajar di Madrasah. Teknologi pendidikan diperlukan untuk meningkatkan mutu dan daya saing madrasah, siswa dan juga alat untuk mengubah *image* masyarakat bahwa madrasah pun mempunyai kelengkapan sarana pendidikan. Sedangkan pendidikan teknologi merupakan materi pembelajaran yang tercermin pada perangkat-perangkat teknologi pendidikan yang tersedia sebagai media pembelajaran.

Pendidikan teknologi dan teknologi pendidikan menjadi materi yang dibutuhkan siswa di kelas untuk meningkatkan nilai tambah proses belajar mengajar. Peningkatan nilai tambah pendidikan teknologi dan teknologi pendidikan di madrasah menunjukkan adanya kesiapan secara kultural yang menguntungkan, yang penting sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan kemanusiaan. Karena pendidikan, secara holistik, merupakan bagian dari kebudayaan bangsa yang membina dan mengem-bangkan secara intensif kemampuan, keterampilan, dan intelektual siswa.

Di dalam proses pendidikan itu ditanamkan sikap dan gaya hidup tertentu sesuai dengan analogi nilai-nilai dan norma yang berlaku, agar siswa lebih sadar menggunakan penalaran dan kemampuan praktisnya dalam rangka mengembangkan kemampuannya. Sebab, pendidikan sebagaimana aspek kebudayaan lainnya cenderung tumbuh dan berkembang menyempurnakan nilai-nilai yang pernah dicapai sebelumnya. Dalam kerangka inilah, pemberdayaan madrasah atau pembaharuan dalam bidang pendidikan teknologi dan penerapan teknologi pendidikan di madrasah dapat

dilihat sebagai kebutuhan sangat mendesak, dengan tujuan ke depan mampu bersaing di pasar pendidikan global untuk memenuhi tenaga profesional dan peningkatan pembangunan bangsa. Pemberdayaan pendidikan di madrasah diperlukan untuk membuka horison baru yang sebelumnya kurang mendapat perhatian.

Pendidikan teknologi dan peran teknologi pendidikan di madrasah bertanggung jawab memberi muatan-muatan kurikulum bernuansa sains dan teknologi. Pendidikan teknologi di madrasah akan menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang teknologi, setidaknya bisa diharapkan punya kemampuan untuk bekerja karena memang memiliki keterampilan. Penerapan kurikulum pendidikan teknologi dan teknologi pendidikan di madrasah dikaitkan secara erat dengan pembangunan bangsa. Madrasah memang bukan tempat yang tepat untuk mengembangkan secara detail kedua konstruksi tersebut, tetapi madrasah dapat menjadi lembaga pendidik yang ikut memproses pembentukan sikap budaya siswa secara intensif menjadi ilmuwan agamis yang memiliki komitmen terhadap kemanusiaan dan masyarakat.

Pendidikan teknologi dan teknologi pendidikan berarti suatu pengembangan kualitas siswa di masa datang dengan menyadari sepenuhnya potensi dan batasan-batasan yang dimiliki. Pemberdayaan madrasah melalui pengembangan teknologi bertujuan menciptakan nilai-nilai baru yang selaras dengan sendi-sendi agama dan peradaban masyarakat akan datang, di saat IPTEK menjadi tulang punggung segala

aktivitas kehidupan. Pemberdayaan madrasah melalui teknologi merupakan tuntutan mendesak untuk meningkatkan peradaban bangsa, dan lebih khusus peradaban masyarakat Islam di Indonesia .

Penyikapan madrasah yang menerima teknologi sebagai bagian dari pengajarannya adalah dalam rangka membangun *shakhsiyyah-islāmiyah* (*Islamic personality*) atau kepribadian paripurna Islam yang mengambil dan menjabarkan konsep-konsep al-Qur'an tentang kemajuan peradaban.⁵⁸ Pesan-pesan al-Qur'an dalam bentuk pengajaran teknologi di madrasah ini menjadi sintesa tentang kebenaran bahwa umat Islam pun sebenarnya mampu menciptakan dan mengembangkan teknologi sebagaimana yang telah dibuktikan dalam sejarahnya di masa lalu yaitu di masa renaissance Islam abad pertengahan.

Singkatnya, madrasah dalam arus perkembangan dan kemajuan IPTEK harus menjadi arena tempat anak didik belajar mengenal dan mencintai teknologi. Dan tanpa perlu bersikap apriori, madrasah pun dapat mendudukan keberadaan IPTEK secara proporsional. IPTEK dibutuhkan sebagai bagian dari tuntutan kehidupan modern yang tak terelakkan. Tapi IPTEK juga bisa dijadikan sarana untuk tumbuh dan tambahnya keimanan anak didik dan masyarakat Islam pada umumnya.

Tantangan lain yang sedang dan akan terus mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam adalah *trend* globalisasi. Masalah globalisasi sebenarnya bukan masalah baru masyarakat Muslim Indonesia.

⁵⁸ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam* (Bandung: Mizan, 1990), 67.

Pembentukan masyarakat muslim Indonesia bahkan bersamaan dengan datangnya gelombang global yang bersal dari Timur Tengah sejak akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20. Globalisasi yang terjadi pada masa ini lebih bersifat religio-intelektual. Tetapi globalisasi yang melanda masyarakat Muslim Indonesia sekarang ini menampilkan watak atau karakter yang berbeda. Proses globalisasi yang terjadi dewasa ini, tidak lagi dari Timur Tengah melainkan dari Barat yang sedang memegang supremasi dan hegemoni dalam berbagai lapangan kehidupan masyarakat dunia umumnya. Globalisasi yang bersumber dari barat tersebut tampil dengan watak ekonomi-politik, dan sains- teknologi. Hegemoni ekonomi-politik dan sains-teknologi bukan hanya menghasilkan globalisasi ekonomi, dan sains teknologi, tetapi juga dalam bidang-bidang lain seperti intelektual, sosial, nilai-nilai dan gaya hidup. Misalnya globalisasi Coca Cola dan Mac Donald, bukan hanya sekedar ekspansi ekonomi, tetapi juga gaya hidup dengan segala implikasinya⁵⁹.

Kini, dunia kita seolah-olah tanpa memiliki lagi batas-batas wilayah dan waktu. Apa yang terjadi dibelahan bumi lain dengan mudah dan jelasnya dapat kita ketahui pada waktu yang bersamaan. Kita bisa menyaksikan *American Idol* lewat siaran langsung TV, via satelit dari Indonesia. Begitu juga peristiwa peledakan Bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2003, tidak sampai hitungan jam informasinya sudah menyebar ke seluruh dunia. Kita sekarang bisa berkomunikasi dengan e-mail (surat

⁵⁹ Azra, *Pendidikan*, 120.

elektronik) melalui internet. Jelasnya dengan berbagai perkembangan alat telekomunikasi modern kita bisa menyaksikan berbagai peristiwa yang terjadi di belahan bumi yang lain. Arti dari semuanya ini adalah era globalisasi berarti terjadi pertemuan dan gesekan nilai-nilai sosial, budaya dan agama yang memanfaatkan jasa komunikasi, transformasi dan informasi hasil modernisasi teknologi. Pertemuan dan gesekan nilai-nilai budaya ini akan menghasilkan kompetisi liar, di mana yang kuat akan menelan yang lemah, yang kuat akan menekan yang lemah dan seterusnya⁶⁰. Tetapi gelombang globalisasi tidak hanya melahirkan tantangan, tetapi juga melahirkan peluang-peluang. Globalisasi musik dunia, misalnya disamping memberi kemudahan masuknya musik-musik barat, yang kemudian mempengaruhi gaya hidup remaja Indonesia, pada sisi lain juga memberi peluang juga pada musik-musik tradisional Indonesia untuk dikenal oleh masyarakat dunia yang lain.

Implikasi dari semua perubahan ini sudah barang tentu juga akan mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Artinya pendidikan Islam ditantang harus juga siap menghadapi pengaruh negatif dari globalisasi, disamping dituntut pula kejeliannya untuk memanfaatkan peluang positif yang diciptakan globalisasi ini. Misalnya globalisasi teknologi internet, disamping membawa pengaruh negatif bagi generasi muda Muslim ketika sarana internet tersebut memberi kemudahan bagi para remaja untuk menjelajah dunia pornografi;

⁶⁰ A. Qodri Aziziy, *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 88.

pada sisi lain juga memberi peluang bagi para anak muda untuk mempunyai akses yang tak terbatas untuk melakukan eksplorasi ilmu pengetahuan. Masalahnya sekarang adalah bagaimana globalisasi ekonomi-politik dan sains dan teknologi tersebut, kemudian menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pelayanan pendidikan Islam ke depan. Untuk itu, sudah saatnya pengembangan kualitas pendidikan Islam, khususnya pendidikan madrasah harus pula secara cermat mempertimbangkan pengaruh negatif *trend* globalisasi tersebut, sambil memikirkan pula bagaimana memanfaatkan pengaruh globalisasi tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah ke depan. Kehidupan di masa depan adalah kehidupan yang penuh dengan persaingan yang ketat, dimana kompetisi ke depan tidak hanya terjadi antara lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, tetapi lembaga pendidikan Islam juga akan menghadapi persaingan yang lebih ketat dari lembaga pendidikan asing yang beroperasi di Indonesia.

2. Makna Substantif Madrasah Sebagai Pendidikan Umum Dengan Kekhasan Agama Islam

Ketika Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN Nomor 2 Tahun 1989) diundangkan, madrasah mengalami perubahan status menjadi sekolah umum yang berciri khas Islam. Konsekuensi dari perubahan status madrasah tersebut disamping merubah status madrasah, juga mengandung adanya keharusan melaksanakan kurikulum yang sama dengan sekolah umum,

di samping kurikulum yang merupakan ciri khas madrasah yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam.

Tindak lanjut dari penyesuaian status di atas, tahun 1994 dikeluarkan Kurikulum Madrasah Tahun 1994, yang pada intinya memuat sepenuhnya (100 %) materi pelajaran umum sebagaimana diberikan pada sekolah umum ditambah dengan ciri khas madrasah (keislaman). Ciri khas agama Islam tersebut meliputi:

- a. Pemberian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang meliputi
 - 1) al-Qur`an-al-Hadith
 - 2) Aqidah-Akhlaq
 - 3) Fiqih
 - 4) Sejarah Kebudayaan Islam
- b. Penciptaan suasana kegamaan, antara lain melalui:
 - 1) Suasana kehidupan madrasah yang agamis
 - 2) Adanya sarana ibadah
 - 3) penggunaan pendekatan yang agamis dalam penyajian mata pelajaran yang memungkinkan.
- c. Pengadaan guru yang memiliki kualifikasi, antara lain guru yang beragama Islam dan berakhlak mulia.⁶¹

Secara konsepsional mulai dari kurikulum 1975 hingga lahirnya kurikulum 1994 dan bahkan dalam kurikulum KBK 2004 dan KTSP 2006, dikotomisasi ilmu pengetahuan umum dan agama madrasah telah dihilangkan

⁶¹ Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 302 Tahun 1993, 12.

melalui pemberian ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan keagamaan kepada siswa secara bersamaan. Akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh, penyatuan tersebut masih belum memenuhi apa yang sebenarnya diharapkan. Hal itu ditandai dengan masih adanya konsep dan desain kurikulum yang terpisah antara ilmu pengetahuan umum dan agama (*sparated subject matter curriculum*). Dalam hal itu, antara mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama tidak didesain secara terintegrasi. Lebih khusus lagi dalam hal itu, konsep dan desain kurikulum mata pelajaran umum (seperti Biologi, Fisika, Kimia) tidak atau masih belum mengintegrasikan imtaq di dalamnya.

Sebenarnya upaya untuk mengatasi persoalan di atas pernah dilakukan oleh pemerintah. Dalam rangka upaya itu, di antaranya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menerbitkan “Naskah Keterkaitan 10 Mata Pelajaran Umum di SMU dengan IMTAQ” (Depdikbud, 1996), yang juga diberlakukan di MA sebagai Sekolah Umum yang berciri khas Islam. Dalam naskah tersebut setiap materi pelajaran IPTEK diberi materi landasan imtaq berupa ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadith yang dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi guru mata pelajaran umum dalam rangka integrasi iptek dan imtaq. Akan tetapi usaha itu ternyata tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan, khususnya di MA. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan implementasi konsep kurikulum tersebut, bahwa kurang berhasilnya pembinaan integritas ilmu pengetahuan umum dan keagamaan di madrasah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurikulum

masih didesain secara terpisah-pisah; belum adanya model/pedoman kurikulum dan pembelajaran terpadu yang dapat menunjang pembentukan integrasi pengetahuan tersebut, di samping kemampuan guru dan sarana yang belum memadai.

Sementara itu, Azra menilai lebih disebabkan oleh karena upaya penyelesaian yang dilakukan tidak bersifat mendasar dan dilakukan secara *ad-hoc* (sementara), parsial, serta bersifat involutif.⁶² Untuk itu, menurutnya, perlu adanya suatu bentuk penyelesaian yang bersifat mendasar, yang tidak sekedar perubahan-perubahan yang hanya memunculkan kerumitan-kerumitan baru daripada terobosan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan baik dari segi konsep maupun visibilitas, kelestarian dan kontinuitasnya. Sehubungan dengan itu, menurutnya perlu adanya peninjauan ulang terhadap ilmu-ilmu empiris (umum) yang diajarkan di madrasah dari segi epistemologis dan aksiologis, sehingga melahirkan ilmu-ilmu umum yang berdasarkan epistemologi Islam.⁶³

Berdasarkan berbagai permasalahan dan pemikiran di atas, maka dipandang perlu untuk menemukan sebuah model pengembangan kurikulum madrasah yang dapat menyatukan ilmu pengetahuan umum (IPTEK) dengan ilmu pengetahuan keagamaan (IMTAQ), khususnya memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terdapat dalam mata pelajaran umum dengan nilai dan norma agama (IMTAQ).

⁶² Azra, *Pendidikan*, 40.

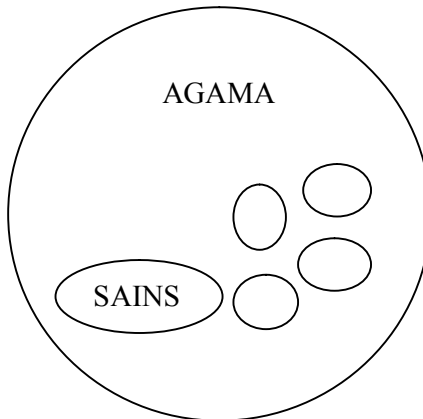
⁶³ *Ibid.*, 29, 41.

Zainal Abidin Bagir⁶⁴ mengembangkan beberapa model integrasi antara ilmu dan agama. Model-model tersebut diklasifikasi dengan menghitung jumlah konsep dasar yang menjadi komponen utama model itu. Jika hanya ada satu, model itu disebut model monadik. Jika ada dua disebut model diadik. Jika ada tiga disebut model triadik, jika ada empat disebut model tetradik, dan jika terdapat lima komponen disebut model pentadik. Model monadik sangat populer dikalangan fundamentalis, religious, atau sekuler. Kalangan religious menyatakan agama merupakan keseluruhan yang mengandung semua cabang kebudayaan. Sementara kalangan sekuler menganggap agama sebagai salah satu cabang kebudayaan. Dalam fundamentalisme religious, agama dianggap sebagai satu-satunya kebenaran dan sains hanyalah salah satu cabang kebudayaan sedangkan dalam fundamentalisme sekuler, kebudayaanlah yang merupakan ekspresi manusia dalam mewujudkan kehidupan yang berdasarkan sains sebagai satu-satunya kebenaran.

Dengan model monadik totalistik seperti ini tidak mungkin terjadi koeksistensi antara agama dan sains karena keduanya menegaskan eksistensi atau kebenaran yang lainnya. Maka hubungan antara kedua sudut pandang ini tidak dapat tidak adalah konflik seperti yang dipetakan Barbour atau John F. Haught mengenai hubungan antara sains dan agama yang secara sekilas sudah diuraikan sebelumnya. Tampaknya pendekatan totalistik ini sulit untuk

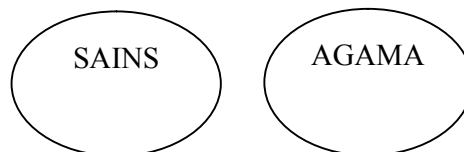
⁶⁴ Zainal Abidin Bagir, dkk., *Integrasi Ilmu dan Agama, Interpretasi dan Aksi* (Bandung : Mizan Pustaka, 2005), 94-98.

digunakan sebagai landasan integrasi sains dan agama di lembaga-lembaga pendidikan dari TK hingga Perguruan Tinggi.



Gambar 2.4
Integrasi antara Ilmu dan Agama Model Monadik Totalistik

Mengingat kelemahan model monadik, diajukan model kedua, yaitu model diadik. Terdapat beberapa varian dari model diadik ini. Pertama mengatakan bahwa sains dan agama adalah dua kebenaran yang setara. Sains membicarakan fakta alamiah, sedangkan agama membicarakan nilai ilahiah. Model ini dapat disebut dengan model diadik komplementer atau relasi independensi.

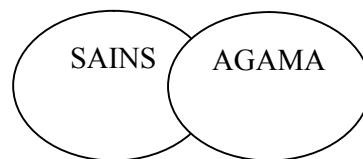


Gambar 2.5
Integrasi antara Ilmu dan Agama Model Diadik Independen

Varian kedua dari model diadik dapat dinyatakan oleh gambar sebuah lingkaran yang terbagi oleh sebuah garis lengkung menjadi dua bagian yang sama luasnya, seperti pada simbol dari Tao dalam tradisi China. Dalam model

ini, sains dan agama adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Hal ini bisa direlevansikan dengan menyimak apa yang diungkapkan Caora bahwa Sains tak membutuhkan mistisme dan mistisme tak membutuhkan sains. Akan tetapi manusia membutuhkan keduanya. Model ini dapat disebut sebagai model diadik komplementer.

Varian ke tiga dapat dilukiskan secara diagram dengan dua buah lingkaran sama besar yang saling berpotongan. Jika dua diagram itu mencerminkan sains dan agama akan terdapat sebuah kesamaan. Kesamaan itulah yang merupakan dialog antara sains dan agama. Misalnya Maurice Buccalille menemukan sejumlah fakta ilmiah didalam kitab suci al-Qur'an. Atau para ilmuwan yang menemukan sebuah bagian otak yang disebut *the god spot* yang dipandang sebagai pusat kesadaran religious manusia. Model ini disebut sebagai model diadik dialogis.



Gambar 2.6
Integrasi antara Ilmu dan Agama Model Diadik Dialogis

Model ketiga adalah model triadik sebagai suatu koreksi terhadap model diadik independen. Dalam model triadik ada unsur ketiga yang menjembatani sains dan agama, yaitu filsafat. Model ini diajukan oleh kaum teosofis yang bersemboyankan "*there is no religion higher than truth*". Kebenaran adalah kesamaan antara sains, filsafat, dan agama.

SAINS	FILSAFAT	AGAMA
-------	----------	-------

Gambar 2.7
Integrasi antara Ilmu dan Agama Model Triadik Komplementer

Muhaimin, telah mengkaji makna substantif madrasah sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam dari 3 (tiga) perspektif, yaitu historis, filosofis, dan sosiologis.⁶⁵

Pertama, perspektif historis. Dilihat dari perspektif historis, bahwa lahirnya madrasah adalah berawal dari pesantren atau merupakan perkembangan modern dari pesantren. Ini menggarisbawahi perlunya nilai-nilai pesantren selalu melekat pada madrasah. Di antara ciri-ciri pondok pesantren yaitu adanya Kiyai dan santri, pengajian kitab, Masjid, dan Pondok. Sebagai implikasinya, maka di madrasah perlu dikembangkan hal-hal berikut.⁶⁶

- a. Kepala madrasah dan guru/pendidik perlu memposisikan dirinya sebagai *kiyai/nyai* dan *ustadh/ustadhah*, sedangkan peserta didik di madrasah diposisikan sebagai santri. Istilah "*nyantri*" mengandung makna "*itba' wa iqtida' akhlāq al-'ulama'*" (mengikuti dan meneladani akhlaqnya ulama, termasuk kepala madrasah, guru/pendidik tenaga kependidikan lainnya), sehingga mereka harus menjadi teladan dan tokoh panutan di Madrasah, yang selalu menekankan pada peserta didiknya bahwa "hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya", menumbuh kembangkan sikap kasih sayang, keikhlasan, kejujuran,

⁶⁵ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 118-128.

⁶⁶ Ibid.

keagamaan, serta suasana kekeluargaan sebagai *roh pendidikan*, yakni merupakan napas kehidupan di setiap lini, lorong, dan sudut pendidikan madrasah. Dengan demikian, para peserta didik (santri) akan memiliki kedekatan hati dengan ulama (kepala madrasah atau guru dan tenaga kependidikan lainnya).

- b. Terdapatnya Pengajian kitab di pesantren. Ini menggarisbawahi bahwa madrasah merupakan wahana untuk mempelajari dan mendalami ajaran dan nilai-nilai agama Islam, serta sebagai wahana pembinaan ruh dan praktik hidup keagamaan Islam untuk mendekatkan peserta didik/santri kepada kitab sucinya. Dengan demikian, madrasah harus menekankan aktivitas pendidikannya agar para peserta didik memiliki kedekatan dan kecintaan terhadap kitab sucinya.

Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 122 sebagai berikut.

وَمَا كَانُوا لِيُنتَفِئُوا فِي الدِّينِ وَلَا يَتَّبِعُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ⁶⁷

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.⁶⁸

⁶⁷ al-Qur'an, 9: 122

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 301.

Berdasarkan ayat tersebut, Madrasah sebagai sekolah umum dengan kekhasan agama Islam berarti merupakan salah satu kelompok (*firqah*) yang mengemban misi *tafaqquh fi al-Din*.

- c. Terdapatnya Masjid dan Pondok di pesantren. Ini menggarisbawahi bahwa madrasah harus berusaha untuk mengembangkan aktivitas pendidikannya agar para peserta didik memiliki kedekatan dan kecintaan terhadap tempat ibadah. Sedangkan Pondok merupakan *symbol* untuk mengekspresikan dan menciptakan konteks atau suasana kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Islami. Meskipun madrasah tidak memiliki pondok, tetapi di dalamnya harus diciptakan suasana interaksi mendidik, terutama antara kepala madrasah dengan seluruh warga madrasah, antar pendidik, antara pendidik dengan peserta didik, atau antara para karyawan (pegawai) dengan peserta didik, dan/atau antara peserta didik dengan peserta didik.

Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 18 sebagai berikut. Di dalam al-Qur'an dinyatakan:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ أُمَّةٍ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَمِينَ⁶⁹

Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.⁷⁰

⁶⁹ al-Qur'an, 9 : 18

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 280.

Berdasarkan ayat tersebut, pendidikan Madrasah sebagai sekolah umum dengan kekhasan agama Islam mengemban misi mendekatkan hati peserta didik ke dalam tempat ibadah, agar hatinya memiliki ketergantungan terhadap masjid.

Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa ada tujuh (golongan orang beriman) yang akan mendapat naungan (perlindungan) dari Allah di bawah naunganNya (pada hari Qiyamat) yang ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, antara lain seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, Hadits tersebut sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ حَنْصَلِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ
عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ وَجَلَ قَلْبُهُ مُطَلِّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ
تَحَابَبَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ أُمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ
وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخَاهَا حَتَّى لَا تَطْعَمَ
شِمْلَهُ مَا تَنْفَعُ بِمِيزِهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عِيْنَاهُ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Khubaib bin 'Abdurrahman dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi saw. bersabda: "Ada tujuh (golongan orang beriman) yang akan mendapat naungan (perlindungan) dari Allah di bawah naungan-Nya (pada hari Qiyamat) yang ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. Yaitu; Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan 'ibadah kepada Rabnya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik lalu dia berkata, "aku takut

kepada Allah", seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis".⁷¹

Kedua, perspektif filosofis. Pertanyaan filosofis yang muncul terkait dengan madrasah antara lain adalah: (1) Apa hakekat madrasah itu? dan (2) siapa peserta didik madrasah itu? Jawaban terhadap pertanyaan filosofis yang *pertama* adalah bahwa Madrasah merupakan salah satu institusi pendidikan Islam, yakni suatu institusi pendidikan yang sengaja didirikan dan diselenggarakan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Sebagai institusi pendidikan Islam, Madrasah melaksanakan kegiatan pendidikan Islam, yaitu “upaya normatif untuk membantu seseorang atau sekelompok orang (peserta didik) dalam mengembangkan pandangan hidup Islami (bagaimana akan menjalani dan memanfaatkan hidup dan kehidupan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam), sikap hidup Islami, yang dimanifestasikan dalam keterampilan hidup sehari-hari”.⁷²

Sedangkan pertanyaan filosofis *kedua* adalah siapa peserta didik Madrasah itu? Pertanyaan ini bisa dijawab bahwa peserta didik madrasah adalah seorang warga negara Indonesia dan warga global yang beragama Islam, atau ia merupakan seorang (warga) muslim sekaligus warga negara Indonesia dan warga dunia (global). Jika jawabannya seperti ini, maka Madrasah perlu mengembangkan kepribadian dan sikap peserta didik sebagai

⁷¹ CD Kitab al-Bukhari hadits ke-1334

⁷² Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi, Op. cit.*, 118-128. Ibid.

orang Islam atau peserta didik muslim sekaligus warga negara Indonesia dan global yang mempunyai hak untuk mengekspresikan pikiran dan pendapatnya dan/atau menjalankan ajaran dan nilai-nilai agama Islam di muka bumi ini. Jawaban-jawaban semacam itu akan berimplikasi pada model pendidikan yang dikembangkan di Madrasah, yaitu melakukan spiritualisasi pendidikan atau penjiwaan nilai-nilai Islam ke dalam semua mata pelajaran atau kegiatan pendidikan yang ada di dalamnya.⁷³

Ketiga, perspektif sosiologis, bahwa Madrasah merupakan institusi sosial. Jika dilihat dari struktur hubungan antar manusianya, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hubungan, yaitu: (1) hubungan atasan-bawahan; (2) hubungan profesional; dan (3) hubungan sederajat atau sukarela.⁷⁴ *Hubungan atasan-bawahan* mengandaikan perlunya kepatuhan dan loyalitas para guru terhadap atasannya, misalnya terhadap pimpinan madrasah, peserta didik terhadap guru dan pimpinannya, terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang telah disepakati bersama atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu, bilamana terjadi pelanggaran terhadap aturan yang disepakati bersama, maka harus diberi tindakan yang tegas selaras dengan tingkat pelanggarannya. *Hubungan profesional* mengandaikan perlunya penciptaan hubungan yang rasional, kritis dinamis antar sesama guru atau antara guru dan pimpinannya dan/atau peserta didik dengan guru dan pimpinannya untuk saling berdiskusi, asah dan asuh, tukar-menukar informasi, saling berkeinginan untuk maju (KAHAMUNA = Kaya Hasrat untuk Maju dan Berguna), serta meningkatkan

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

kualitas madrasah, profesionalitas guru dan kualitas layanan terhadap peserta didik. Dengan perkataan lain, perbincangan antar guru dan antar peserta didik, juga antara guru dengan peserta didik lebih banyak berorientasi pada pengembangan kualitas akademik dan non akademik, bukan “ngerumpi” yang tiada arti. *Hubungan sederajat* atau sukarela merupakan hubungan manusiawi antar teman sejawat, untuk saling membantu, mengingatkan dan melengkapi antara satu dengan lainnya.

3. Strategi Penguatan Kekhasan Agama Islam

Untuk mengembangkan madrasah sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam, maka kurikulum madrasah perlu dikembangkan secara terpadu (integratif), dengan menjadikan ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai petunjuk dan sumber konsultasi bagi pengembangan mata pelajaran-mata pelajaran umum. Model pengintegrasian dapat dilakukan melalui integrasi dengan materi pelajaran, proses pembelajaran, dalam memilih bahan ajar, dan integrasi dalam memilih media pembelajaran.⁷⁵

Pengintegrasian imtaq dengan materi pembelajaran adalah upaya mengintegrasikan konsep atau ajaran agama ke dalam materi (teori, konsep) yang sedang dipelajari oleh peserta didik atau diajarkan oleh pendidik/guru. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: *pertama*, pengintegrasian filosofis, yakni bila tujuan fungsional mata pelajaran umum sama dengan tujuan fungsional mata pelajaran agama. Misalnya: Islam mengajarkan perlunya hidup sehat, sementara Ilmu Kesehatan juga begitu. Matematika

⁷⁵ Ibid., 131.

mengajarkan ketelitian, kejujuran, Islam juga mengajarkan demikian. *Kedua*, pengintegrasian dilakukan karena konsep agama berlawanan dengan konsep pengetahuan umum. Misalnya: guru biologi mengajarkan manusia berasal dari monyet (mengacu pada teori Darwin), sedangkan guru PAI mengajarkan manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Guru PAI mengajarkan bunga bank adalah haram, sementara guru ekonomi mengajarkan bunga bank boleh. Hal-hal yang berlawanan tersebut harus diselesaikan, dan peserta didik jangan sampai diajari konsep yang berlawanan. Misalnya, untuk teori penciptaan manusia tersebut bisa dipertemukan pada aspek teori evolusinya, sedangkan perbedaannya terletak pada asal usulnya. Pada kasus bunga bank, bisa dipertemukan dengan cara menjelaskan kepada peserta didik bahwa di Bank itu terdapat banyak pegawai, mulai dari direktur hingga ke staf-staf, mereka semuanya harus diberi gaji, dari mana gaji mereka? Antara lain dari bunga bank tersebut. Karena itu bunga bank bisa ditolerer asalkan tidak sampai berlebih-lebihan yang dapat mencekik para nasabah. *Ketiga*, pengintegrasian dilakukan jika konsep agama saling mendukung dengan konsep pengetahuan umum. Misalnya: guru Ilmu Kesehatan mengajarkan bahwa kebanyakan penyakit berasal dari makanan, sehingga *diet* perlu dilakukan untuk kesehatan. Guru Ilmu Kesehatan dapat meneruskan bahwa puasa adalah *diet* yang sangat baik. Cukup begitu saja, tidak perlu diberikan dalil al-Qur'an dan Hadits atau uraian yang bertele-tele.

Pengintegrasian imtaq dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan bertolak dari konsep, bahwa pada setiap proses pembelajaran

diupayakan untuk tidak sampai berlawanan dengan ajaran agama Islam. Misalnya, pemberian hukuman pada peserta didik dengan cara memukul bagian anggota tubuh yang rawan, seperti menampar kepala, menganiaya peserta didik yang berakibat sakit parah, dan lain-lain. Atau mungkin guru olah raga laki-laki di Madrasah Aliyah mengajar renang pada peserta didik perempuan, demikian sebaliknya.

Pengintegrasian imtaq dalam memilih bahan ajar dapat dilakukan dengan cara, misalnya guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris memilih bahan-bahan ajar yang memuat ajaran Islam untuk dibahas, seperti: dalam memilih sajak-sajak atau tema-tema kajian yang bernafaskan Islam. Ini berarti guru ingin meningkatkan IMTAQ peserta didik melalui Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Sedangkan *pengintegrasian imtaq dalam memilih media pembelajaran* dapat dilakukan dengan cara, misalnya: ketika guru matematika memilih sosok, ia menggunakan sosok masjid untuk mengganti rumah, seperti: sebuah gedung masjid panjangnya 20 m, lebarnya 15 m, berapa luasnya? Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan hati peserta didik kepada Masjid. Tentu saja ia dilakukan ketika ada peluang untuk mengaitkannya, dan tidak perlu dipaksakan.

Dengan demikian, di Madrasah perlu dilakukan upaya spiritualisasi pendidikan atau berupaya menginternalisasi nilai-nilai atau spirit agama melalui proses pendidikan ke dalam seluruh aspek pendidikan di Madrasah. Hal ini dimaksudkan untuk memadukan nilai-nilai sains dan teknologi serta seni dengan keyakinan dan kesalehan dalam diri peserta didik. Ketika belajar

Biologi misalnya, maka pada waktu yang sama diharapkan pelajaran itu dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah, karena di dalam ajaran agama diterangkan bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan keanekaragaman (*biodiversity*) di muka bumi ini dan semuanya tunduk pada hukum-hukum-Nya.⁷⁶

Strategi penguatan kekhasan agama Islam juga bisa dilakukan melalui upaya pengembangan budaya agama dalam komunitas madrasah, yang berarti bagaimana mengembangkan agama Islam di madrasah sebagai pijakan nilai, semangat, sikap, dan perilaku bagi para aktor madrasah, seperti kepala madrasah, guru dan tenaga kependidikan lainnya, orang tua murid, dan peserta didik itu sendiri.⁷⁷

Pengembangan budaya agama dalam komunitas madrasah tidak bisa dilepaskan dari peran para penggerak kehidupan keagamaan di madrasah tersebut yang berusaha melakukan aksi pembudayaan agama di madrasah. Strategi pengembangan budaya agama dalam komunitas madrasah, meminjam teori Koentjoroningrat tentang wujud kebudayaan, meniscayakan adanya upaya pengembangan dalam *tiga tataran*, yaitu tataran nilai yang dianut, tataran praktik keseharian, dan tataran simbol-simbol budaya.⁷⁸

Pada *tataran nilai* yang dianut, perlu dirumuskan secara bersama nilai-nilai agama yang disepakati dan perlu dikembangkan di sekolah, untuk selanjutnya dibangun komitmen dan loyalitas bersama di antara semua warga

⁷⁶ Ibid., 133.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 157-158.

sekolah terhadap nilai-nilai yang disepakati. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat vertikal dan horisontal. Yang vertikal berwujud hubungan manusia atau warga sekolah dengan Allah (*ḥabl min Allah*), dan yang horisontal berwujud hubungan manusia atau warga sekolah dengan sesamanya (*ḥabl min al-Nas*), dan hubungan mereka dengan lingkungan alam sekitarnya.

Dalam *tataran praktek keseharian*, nilai-nilai keagamaan yang telah disepakati tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian oleh semua warga sekolah. Proses pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: *pertama*, sosialisasi nilai-nilai agama yang disepakati sebagai sikap dan perilaku ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang di madrasah. *Kedua*, penetapan *action plan* mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis yang akan dilakukan oleh semua pihak di madrasah dalam mewujudkan nilai-nilai agama yang telah disepakati tersebut. *Ketiga*, pemberian penghargaan terhadap prestasi warga madrasah, seperti guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik sebagai usaha pembiasaan (*habit formation*) yang menjunjung sikap dan perilaku yang komitmen dan loyal terhadap ajaran dan nilai-nilai agama. Penghargaan tidak selalu berarti materi (ekonomik), melainkan juga dalam arti sosial, kultural, psikologik, ataupun lainnya.

Dalam *tataran simbol-simbol budaya*, pengembangan yang perlu dilakukan adalah mengganti simbol-simbol budaya yang kurang sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai agama dengan simbol budaya yang agamis. Perubahan simbol dapat dilakukan dengan mengubah model berpakaian

dengan prinsip menutup aurat, pemasangan hasil karya peserta didik, foto-foto, dan motto yang mengandung pesan-pesan nilai-nilai keagamaan, dan lain-lain.

Adapun strategi untuk membudayakan nilai-nilai agama di madrasah dapat dilakukan melalui: (1) *power strategy*, yakni strategi pembudayaan agama di madrasah dengan cara menggunakan kekuasaan atau melalui *people's power*, dalam hal ini peran kepala madrasah dengan segala kekuasaannya sangat dominan dalam melakukan perubahan; (2) *persuasive strategy*, yang dijalankan lewat pembentukan opini dan pandangan masyarakat atau warga madrasah; dan (3) *normative re-educative*. Norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Norma termasyarakatkan lewat *education*. *Normative* digandengkan dengan *re-educative* (pendidikan ulang) untuk menanamkan dan mengganti paradigma berfikir masyarakat madrasah yang lama dengan yang baru.⁷⁹

Pada strategi *pertama* tersebut dikembangkan melalui pendekatan perintah dan larangan atau *reward and punishment*. Sedangkan pada strategi *kedua* dan *ketiga* tersebut dikembangkan melalui pembiasaan, keteladanan, dan pendekatan persuasif atau mengajak kepada warganya dengan cara yang halus, dengan memberikan alasan dan prospek baik yang bisa meyakinkan mereka. Sifat kegiatannya bisa berupa aksi positif dan reaksi positif. Bisa pula berupa proaksi, yakni membuat aksi atas inisiatif sendiri, jenis dan arah ditentukan sendiri, tetapi membaca munculnya aksi-aksi agar dapat ikut

⁷⁹ Ibid.

memberi warna dan arah pada perkembangan. Bisa pula berupa antisipasi, yakni tindakan aktif menciptakan situasi dan kondisi ideal agar tercapai tujuan idealnya.⁸⁰

Untuk mengembangkan budaya agama dalam komunitas madrasah tersebut diperlukan standar yang jelas, yang dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat diukur dan dievaluasi keberhasilannya. Contoh standar budaya religius misalnya:

- a. Dilaksanakan shalat berjamaah dengan tertib dan disiplin di masjid madrasah.
- b. Tidak terlibat dalam perkelahian antar-peserta didik.
- c. Sopan santun berbicara antara peserta didik, antara peserta didik dengan guru dan tenaga kependidikan lainnya, antara guru dengan guru, dan antara guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- d. Cara berpakaian peserta didik yang Islami.
- e. Cara berpakaian guru dan tenaga kependidikan lainnya yang Islami.
- f. Pergaulan peserta didik perempuan dan peserta didik laki-laki sesuai dengan norma Islam.
- g. Pergaulan peserta didik dengan guru dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan norma Islam.
- h. Peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya datang ke madrasah tepat waktu.
- i. Tercipta budaya senyum, salam, dan sapa.

⁸⁰ Ibid.

- j. Saling menghormati, membantu dan berbagi antara warga madrasah.
- k. Warga madrasah menjaga keindahan diri, ruangan, dan lingkungan madrasah.
- l. Warga madrasah lemah lembut dalam bertutur kata.
- m. Warga madrasah disiplin dalam belajar.
- n. Peserta didik disiplin dalam bermain.
- o. Warga madrasah disiplin dalam beribadah.
- p. Warga madrasah disiplin dalam berolah raga.
- q. Warga madrasah tidak terlibat miras dan narkoba.
- r. Warga madrasah berperilaku jujur.
- s. Tercipta budaya mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih warga madrasah.
- t. Segala keperluan stakeholder terlayani dengan ramah, cepat dan tepat.⁸¹

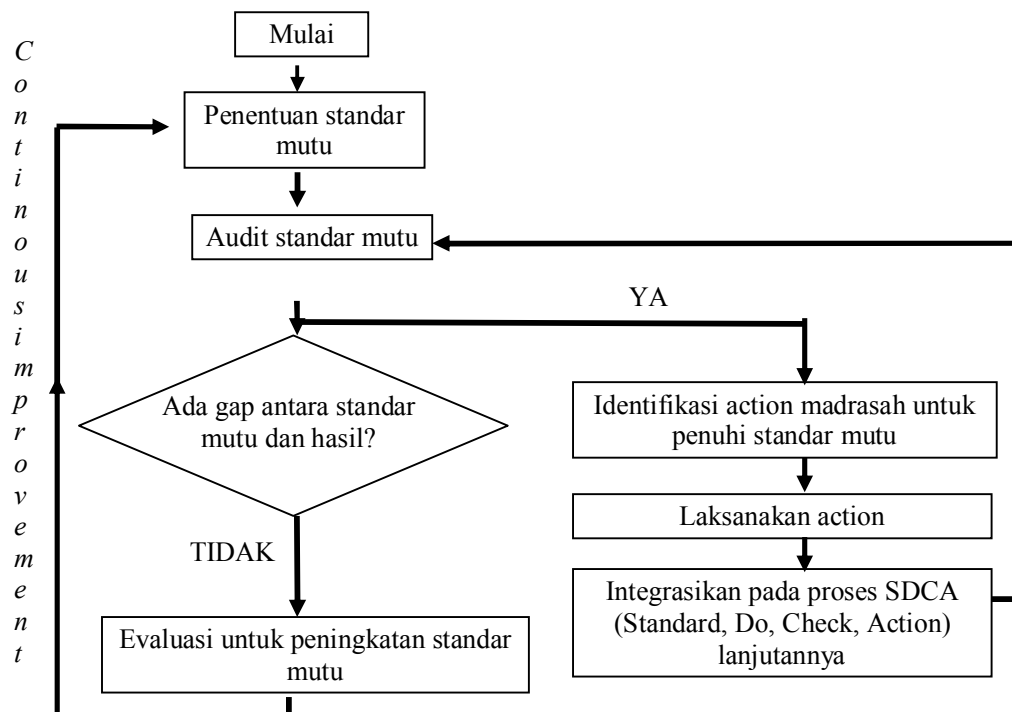
Strategi penguatan kekhasan agama Islam juga bisa dilakukan melalui upaya praktik pengendalian mutu amaliyah keagamaan Islam. Pengendalian mutu dapat dilakukan melalui model PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) dari TQM yang akan menghasilkan pengembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) dari mutu amaliyah keagamaan Islam peserta didik. Penerapan PDCA dari TQM, yaitu:

- a. *Plan*, adanya perencanaan
- b. *Do*, adanya pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan

⁸¹Muhaimin, *Pemikiran*, 138-139

- c. *Check*, adanya monitoring, pemeriksaan, pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pelaksanaan termasuk Audit Mutu Internal
- d. *Action*, adanya tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi⁸²

Manajemen kendali mutu dalam penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.8
Manajemen Kendali Mutu

Dari gambar tersebut dapat difahami bahwa untuk mengendalikan mutu amaliyah keagamaan Islam peserta didik di madrasah harus dimulai dari penetapan standar mutu kecakapan amaliyah keagamaan, kemudian dilakukan

⁸² Ibid., 140.

pemenuhan standar dan dicek keberhasilannya, yaitu dengan membandingkan antara performa aktual (kecakapan peserta didik sebagaimana adanya) dengan performa ideal (sebagaimana yang ditetapkan dalam standar mutu). Dengan demikian akan diketahui apakah performa aktual peserta didik sejajar atau melebihi standar mutu atau sebaliknya? Jika performa aktual kurang dari standar mutu, maka dilakukan perbaikan, sebaliknya jika sejajar atau bahkan melebihi standar mutu, maka ditindaklanjuti dengan standar mutu yang lebih tinggi.⁸³

⁸³ Ibid., 142.